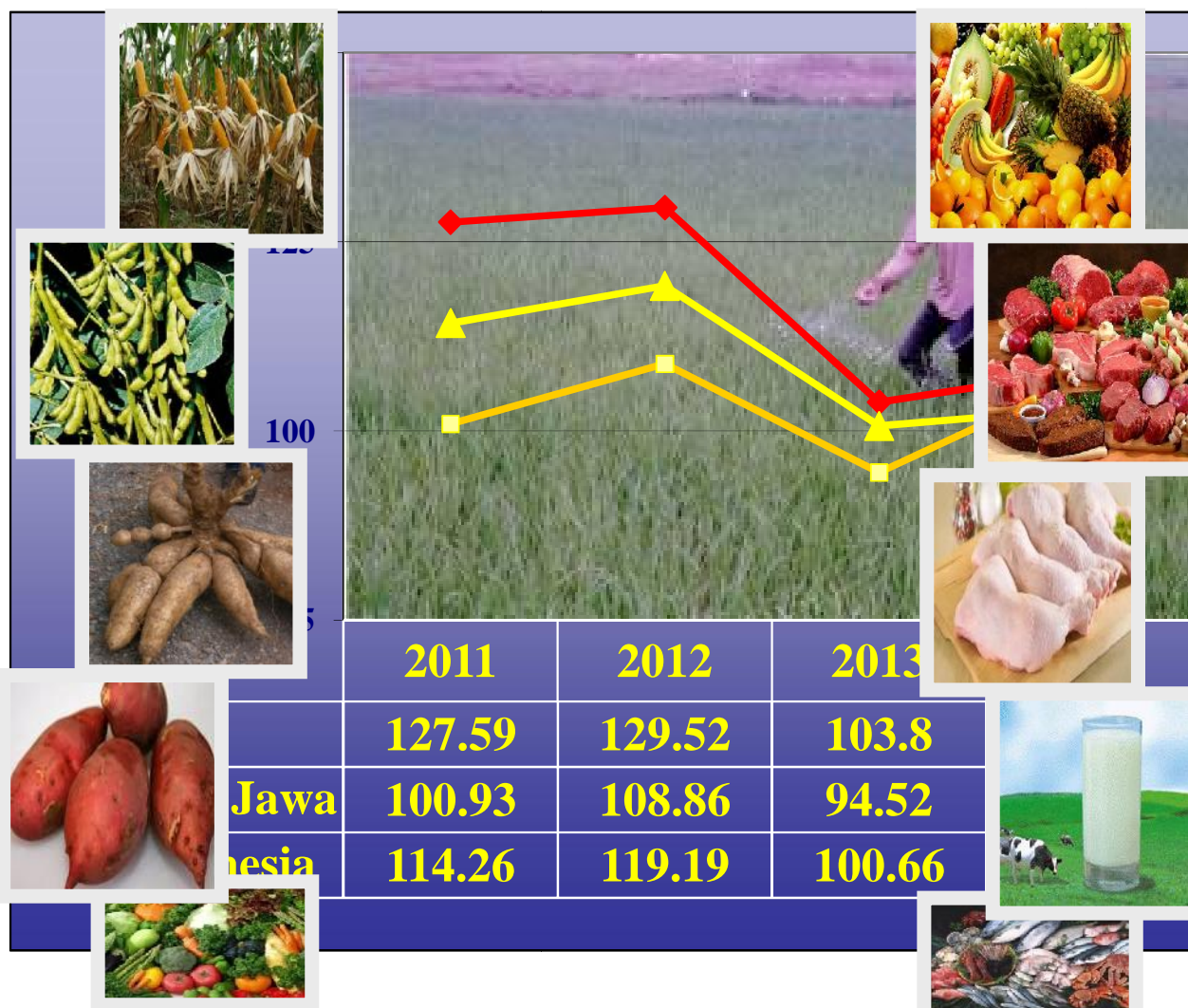




LAPORAN KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010 - 2014



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah, Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Berbicara ketahanan pangan, tidak hanya cukup memperhatikan aspek produksi saja, tetapi bagaimana produksi pangan tersebut dapat didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi kelangsungan hidupnya. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, maka Implementasi pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Dengan demikian, program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan menjadi tanggung

tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Agar pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan nasional dapat berhasil, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT,140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit kerja Eselon I pada Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan, bersinergi dengan instansi terkait lainnya dalam memantapkan ketahanan pangan terutama dalam meningkatkan percepatan diversifikasi pangan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat. Sedangkan fungsi koordinasi ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006, dimana Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan nasional dan mensinergikan program pembangunan ketahanan pangan.

Dalam rangka pembangunan ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya mendorong pemantapan ketahanan pangan di daerah. Dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan program ketahanan pangan, antara lain : Desa Mandiri Pangan, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA) dan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Kegiatan strategis tersebut tertuang dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014 sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Jangka waktu pelaksanaan renstra selama 5 tahun diimplementasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan

Anggaran (DPA), dan Penetapan Kinerja (PK) sebagai pedoman pelaksanaan kinerja selama satu tahun.

Pembangunan ketahanan pangan akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program Ketahanan Pangan dalam rangka pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measureable*) dan berkesinambungan (*sustainability*). Dengan demikian pelaksanaan program ketahanan pangan dalam rangka membangun ketahanan pangan dapat diarahkan dengan benar, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya.

1.2 Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan 2010 – 2014 ini mempunyai tujuan diantaranya adalah :

- a. Sebagai bahan informasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Ketahanan Pangan dalam rangka pembangunan ketahanan pangan Nasional,
- b. Sebagai bahan informasi pencapaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dalam Renstra 2010 – 2014,
- c. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kinerja Badan Ketahanan Pangan dari berbagai aspek yang dapat ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019.

BAB II. VISI DAN MISI BADAN KETAHANAN PANGAN

2.1 Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, Visi adalah suatu harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai dengan kondisi pembangunan ketahanan pangan, Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2010-2014, yaitu:

***Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif
dalam pemantapan ketahanan pangan***

Handal: Berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan,

Aspiratif : Berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat,

Inovatif : Berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru,

Pemantapan ketahanan pangan : Upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian mendukung dan menjabarkan visi Kementerian Pertanian tahun 2010 – 2014 terutama pada aspek ketahanan pangan.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi diatas, Badan Ketahanan Pangan menetapkan misi dalam tahun 2010–2014, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
2. Pengembangan dan pematapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;
3. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

2.3 Tujuan

Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
5. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.

BAB III. PROGRAM DAN ANGGARAN

3.1 Program dan Anggaran

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat mencakup 4 (empat) kegiatan, yaitu : (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan, Kegiatan satu sampai tiga merupakan kegiatan prioritas nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peranserta instansi terkait sesuai dengan masing – masing kegiatan yang dilaksanakan, serta kerjasama dengan *stakeholders*/pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan selama periode tahun 2010– 2014 mendapat alokasi anggaran yang dituangkan dalam Renja KL atau Rencana Kerja Tahunan, dengan perkembangan alokasi anggaran Badan Ketahanan Pangan seperti pada **Tabel 1**. Alokasi anggaran setiap tahun mengalami penghematan karena perubahan kebijakan terkait dengan subsidi BBM, namun juga mendapat alokasi anggaran tambahan (APBN P) untuk pengembangan kegiatan P2KP berbasis KRPL dalam rangka mendukung swasembada beras melalui penurunan konsumsi beras.

Secara umum penetapan alokasi anggaran didasarkan kebijakan secara makro, serta hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya, sehingga anggaran belanja Kementerian Pertanian disesuaikan pada skala prioritas kegiatan yang bertujuan untuk pencapaian swasembada pangan, peningkatan daya saing produk, diversifikasi pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya skala prioritas program tersebut, alokasi anggaran di

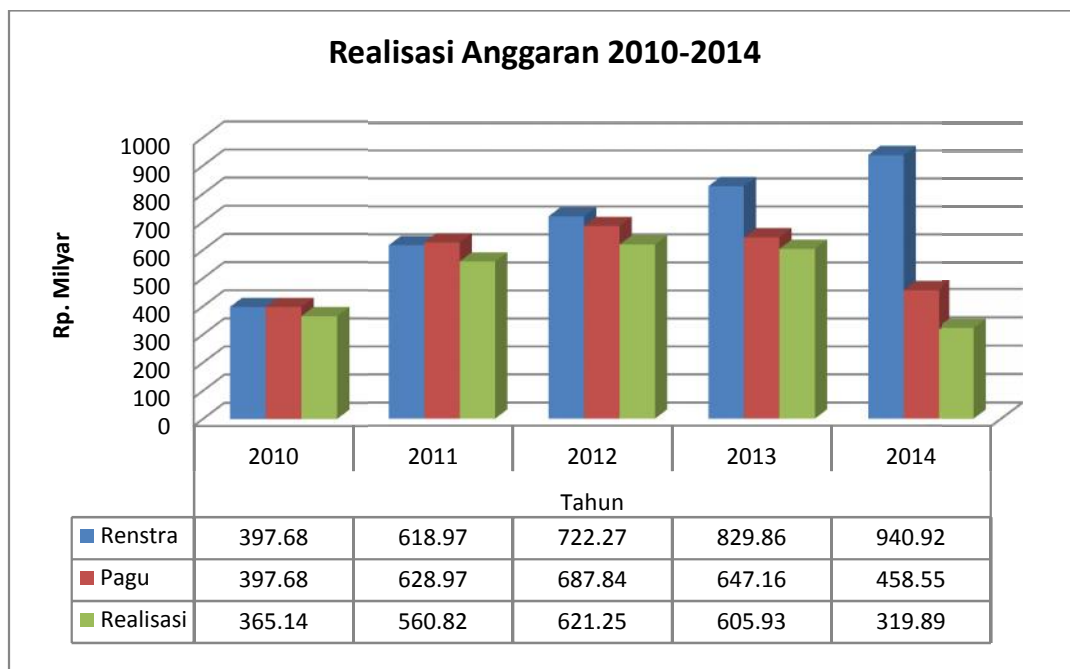
Badan Ketahanan Panganpun mengalami perubahandari tahun ke tahun sehingga berdampak pada perubahan target fisik kegiatan seperti LDPM, Lumbung Pangan, Desa Mandiri Pangan, P2KP, serta target lainnya.

Tabel 1. Pagu Anggaran berdasarkan Renstra dan RKT serta Realisasi Anggaran tahun 2010 – 2014,

Posisi 12 Nopember 2014 (Rp, Milyar)

URAIAN	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
RENSTRA	397,68	618,97	722,27	829,86	940,92
PAGU	397,68	628,97	687,84	647,16	458,55
REALISASI	365,14	560,82	621,25	605,93	319,89

Grafik 1. Pagu Anggaran berdasarkan Renstra dan RKT serta Realisasi Anggaran tahun 2010 – 2014,



Ket :

*) Realisasi Anggaran Tahun 2014 per tanggal 12 Nopember 2014

Naiknya alokasi anggaran tahun 2011 dari tahun 2010 antara lain disebabkan oleh bertambahnya bansos yang diberikan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) ke daerah yaitu Bansos Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang pada tahun 2010 sebanyak 2.000 kelompok menjadi 4.020.

3.2 Permasalahan dalam serapan anggaran

Belum optimalnya penyerapan anggaran lingkup Badan Ketahanan Pangan tahun 2010 – 2014:

- 1 Masih lemah koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran di pusat dan daerah;
- 2 Satuan kerja lingkup Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan proses mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan sehingga sering menghambat untuk meneruskan pelaksanaan kegiatan dan menyebabkan keterlambatan penyerapan belanja;
- 3 Adanya masalah internal yaitu: (i),kurang memahami mekanisme pencairan anggaran; (ii), adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran; (iii), satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil; (iv),kegiatan menggunakan sumber dana pinjaman luar negeri; dan (v), adanya kegiatan PILKADA, PILPRES dan PILEG;
- 4 Pelaksanaan pada tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme yang sangat kompleks sehingga sangat hati-hati;
- 5 Terjadi revisi anggaran hampir 3-4 kali dalam setahun yang diakibatkan oleh perubahan akun anggaran, adanya tanda bintang “blokir” dan kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan;
- 6 Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran).

3.3 Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Program/Kegiatan.

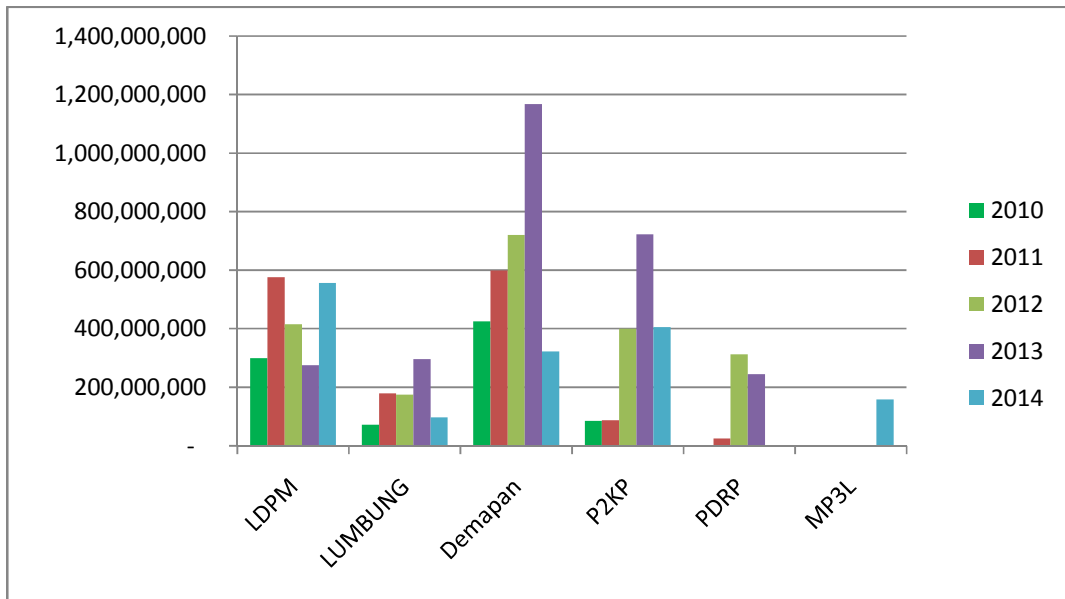
Pemeriksaan dilakukan melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan,

untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Beberapa hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan tahun 2010 – 2014 yaitu :

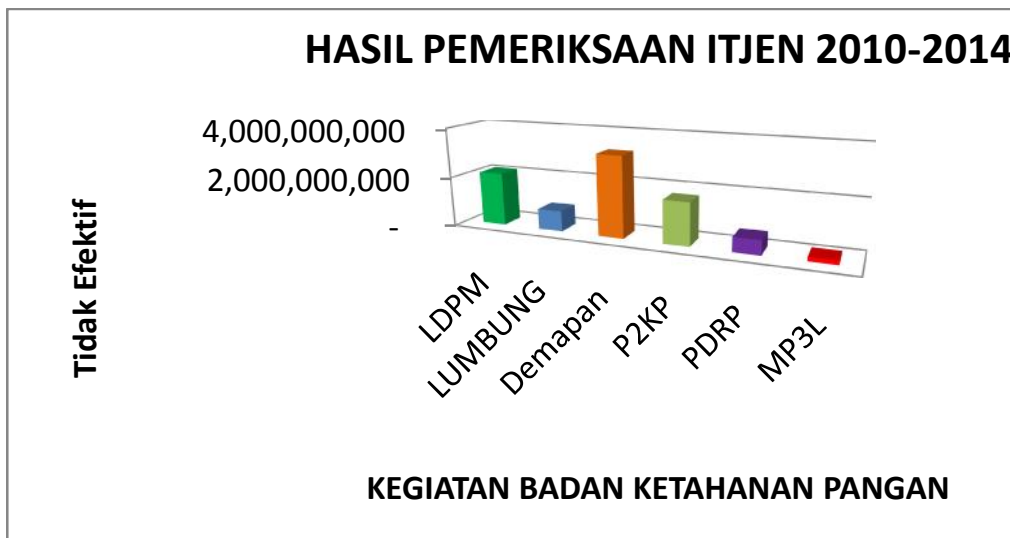
1. Kegiatan tidak/kurang efektif yaitu fakta dari hasil membandingkan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan TOR dan dokumen lainnya dengan hasil yang dicapai menunjukkan adanya ketidak/kekurang efektivitasan;
2. Kegiatan tidak/kurang efisien yaitu fakta dari hasil membandingkan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan TOR dan dokumen lainnya dengan hasil yang dicapai menunjukkan adanya ketidak/kekurang efisienan;
3. Tidak tertib yaitu adanya kekurangtaatan dan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan;
4. Kerugian Negara yaitu terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Grafik 2. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif per tahun dan per kegiatan.



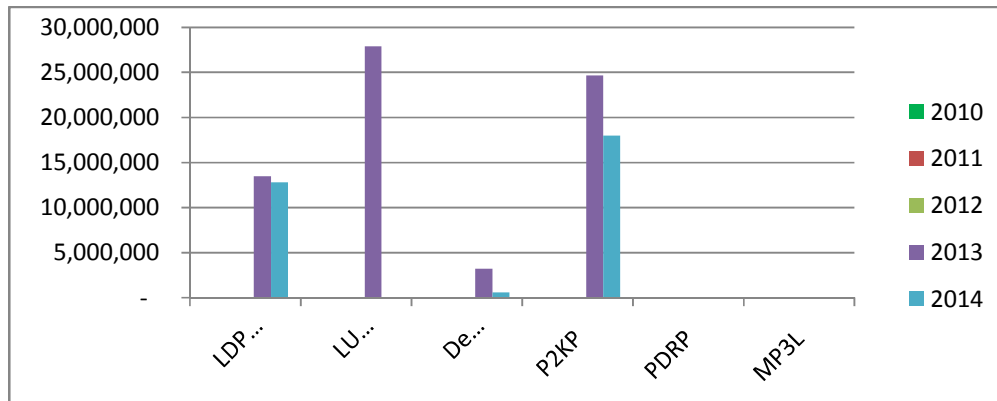
Grafik 2 di atas untuk masing-masing kegiatan Badan Ketahanan Pangan dari tahun 2010 - 2013 menunjukkan kenaikan anggaran kurang efektif, namun pada tahun 2014 sudah berkurang signifikan. Anggaran yang kurang efektif sangat tinggi pada kegiatan Demapan tahun 2013.

Grafik 3. Perbandingan Anggaran Tidak Efektif pada Kegiatan Badan Ketahanan Pangan.



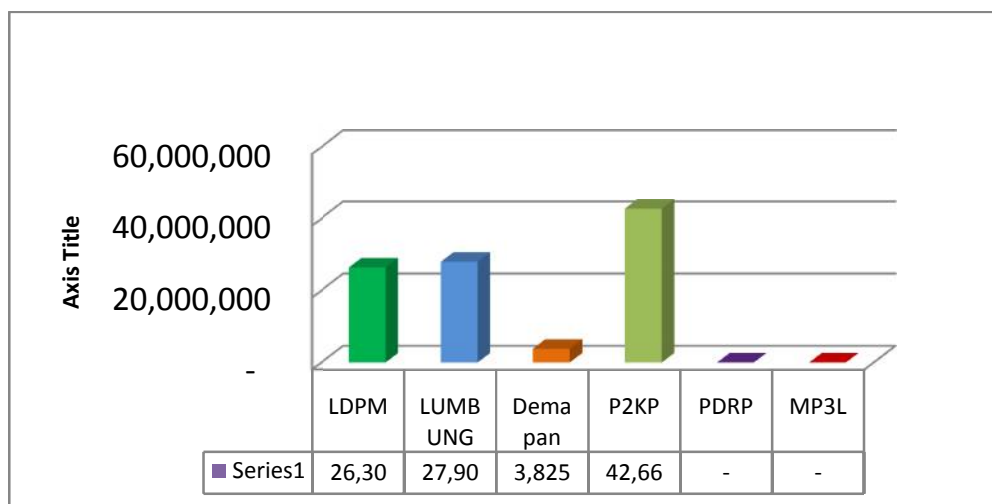
Dari grafik 3 di atas dapat dilihat dari tahun 2010 – 2014 kegiatan yang paling tinggi nilai tidak efektif yaitu pada kegiatan Demapan dan LDPM.

Grafik 4. Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per tahun dan per kegiatan.



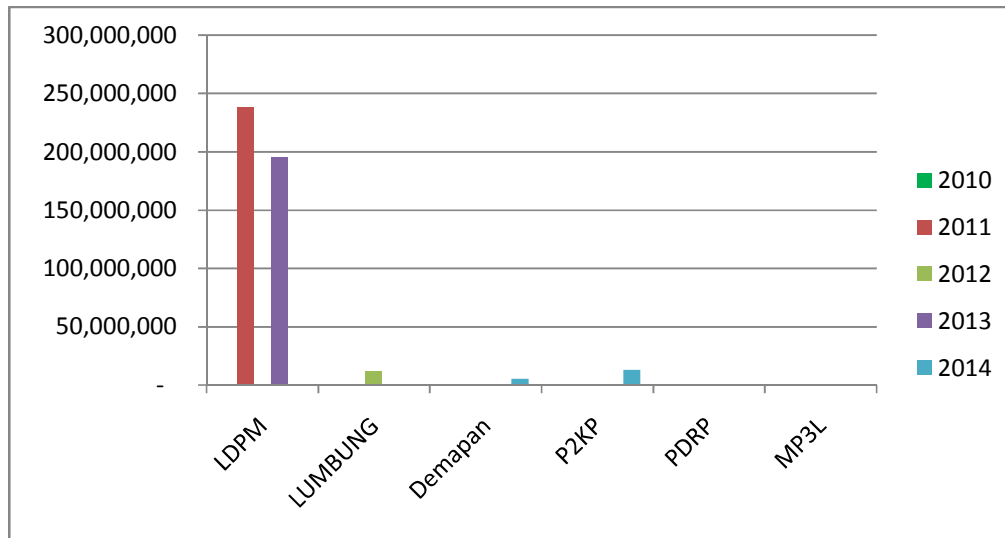
Grafik 4 diatas menunjukkan bahwa untuk kegiatan LDPM, pemanfaatan anggaran kurang efisien terjadi di tahun 2013 dan 2014, untuk Lumbung terjadi di tahun 2013, untuk Demapan terjadi di tahun 2013 dan 2014, untuk P2KP pada tahun 2013 dan 2014. Dua kegiatan yaitu PDRP dan MP3L tidak terdapat anggaran kurang efisien.

Grafik 5. Perbandingan anggaran kurang efisien per kegiatan tahun 2010 –2014.



Grafik 5 di atas menunjukkan jumlah anggaran tidak efisien pada kegiatan LDPM dan Lumbung hampir sama sedangkan untuk P2KP tinggi dan Demapan dan PDRP dan MP3L kecil.

Grafik 6. Perbandingan Anggaran tidak tertib per tahun dan per kegiatan.



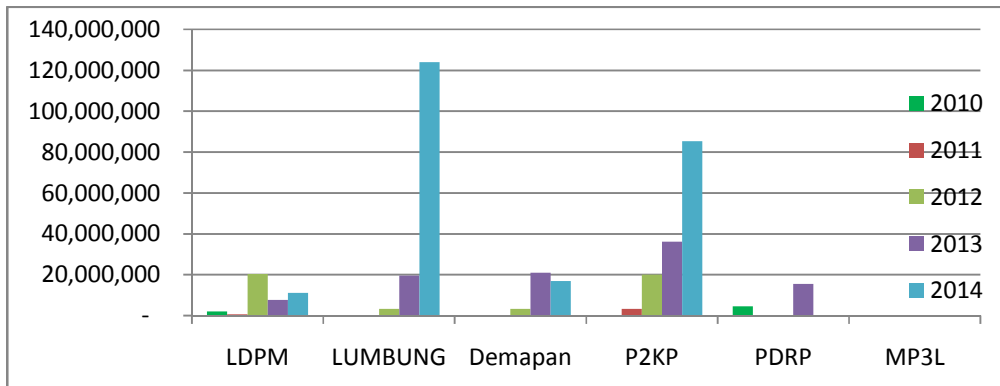
Grafik 6 di atas menunjukkan bahwa untuk anggaran kurang tertib yaitu pada tahun 2011 dan 2013 pada kegiatan LDPM sangat tinggi sedangkan untuk Lumbung, Demapan, P2KP hanya ada di tahun 2012 dan 2014. Sedangkan untuk PDRP dan MP3L tidak terdapat anggaran kurang tertib.

Garafik 7. Perbandingan anggaran kurang tertib per kegiatan tahun 2010 –2014.



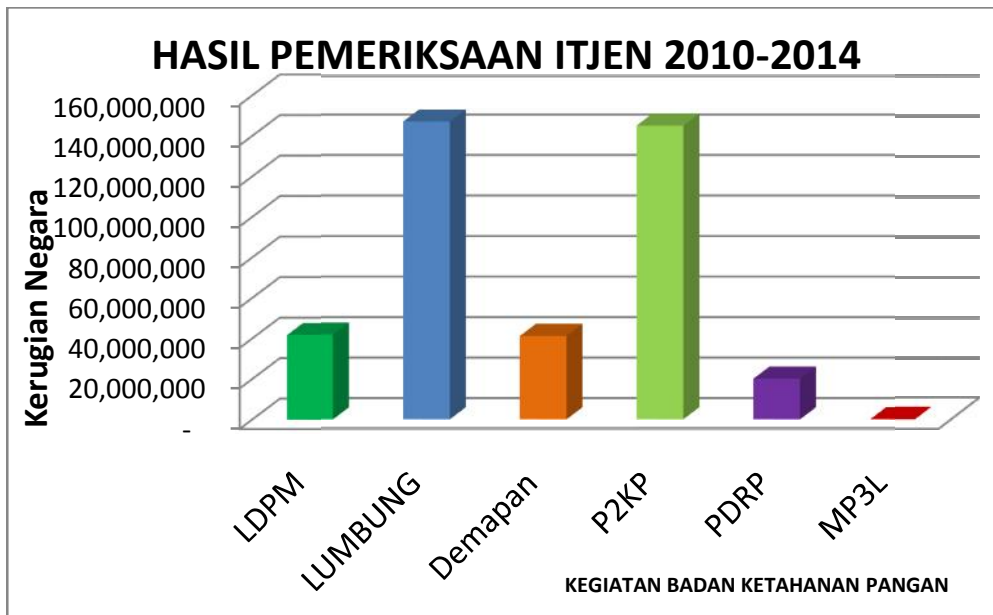
Grafik 7 di atas menunjukkan bila dibandingkan dengan per kegiatan anggaran kurang tertib yang paling tinggi ada pada kegiatan LDPM.

Grafik 8. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tahun dan per kegiatan.



Grafik 8 di atas menunjukkan bahwa Tuntutan Ganti Rugi pada kegiatan Lumbung dan P2KP pada tahun 2014 cukup tinggi.

Grafik 9. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per kegiatan tahun 2010 –2014.



Grafik 9 di atas menunjukkan bahwa jumlah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kegiatan bahwa TGR untuk kegiatan Lumbung dan P2KP paling tinggi dibanding kegiatan lainnya.

3.4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,

Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut oleh Satuan Kerja langsung ditindaklanjuti, sehingga Badan Ketahanan Pangan tampil

dengan warna putih "**Bebas**" dari penyimpangan dikarenakan jumlah kasus kerugian Negara relatif kecil dari tahun 2010 – 2014.

BAB IV. CAPAIAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran, Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (*Medium-Term Expenditure Framework*), penganggaran terpadu (*Unified Budget*), dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*).

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 0142/M,PPN/06/2009 tentang pelaksanaan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) untuk pembangunan jangka menengah tahun 2010 – 2014.

Reformasi perencanaan dan penganggaran mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi. Sejalan dengan adanya reformasi perencanaan dan penganggaran, Badan Ketahanan Pangan merestrukturisasi program dan kegiatan ketahanan pangan sehingga setiap unit kerja memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan capaian indikator kinerja mulai dari input, output hingga outcomenya. Dalam capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan tidak hanya dilihat dari aspek anggaran tapi juga capaian fisik kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja tahunan (RKT).

4.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

A. Penurunan Penduduk Rawan Pangan.

Tingkat perkembangan kerawanan pangan ditunjukkan dengan Angka Rawan Pangan yang merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat, yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Data dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan adalah data hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS dimana angka kecukupan konsumsi kalori penduduk Indonesia per kapita per hari

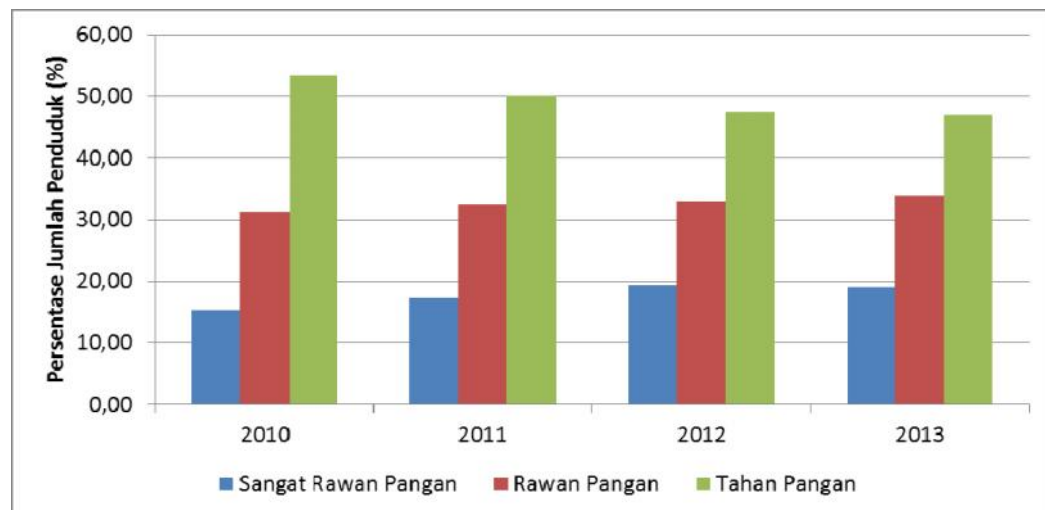
berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) 2004 adalah 2000 kkal. Persentase rawan pangan berdasar angka kecukupan gizi (AKG) suatu daerah, dihitung dengan menjumlahkan penduduk dengan konsumsi kalori kurang dari 1400 kkal (70% AKG) perkapita dibagi dengan jumlah penduduk pada golongan pengeluaran tertentu. Angka rawan pangan sejak tahun 2010–2013 ditunjukkan pada Tabel 2 dan Grafik 10.

Tabel 2. Kerawanan Pangan Berdasarkan Nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2010-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Sangat Rawan Pangan (< 70% AKG)	Prosentase	Jumlah Penduduk Rawan Pangan (70%-89,9% AKG)	Prosentase	Jumlah Penduduk Tahan Pangan (>=90% AKG)	Prosentase
2010	35,710,964	15,34	72,442,169	31,12	124,608,211	53,53
2011	42,080,210	17,41	78,478,018	32,48	121,010,191	50,1
2012	47,648,580	19,46	80,579,820	32,91	116,612,696	47,63
2013*)	47,020,098	19,04	83,651,655	33,87	116,308,063	47,09

Ket, *) Angka Triwulan I
 Sumber : BPS RI – Data Susenas

Grafik 10. Kerawanan Pangan Berdasarkan Nilai Angka Kecukupan Gizi Tahun 2010 – 2013.



Keterangan:

Sangat rawan : (a) Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG;

Rawan Pangan : (b) Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG;

Tahan pangan : (c) Kosumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG,

Berdasarkan perkembangan angka rawan pangan pada tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa angka sangat rawan mengalami kenaikan terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 sebesar 15,34 persen, tahun 2011 sebesar 17,41 persen, tahun 2012 sebesar 19,46 persen, dan tahun 2013 Triwulan I terjadi mengalami sedikit penurunan menjadi dan 19,04 persen. Secara teori penyebab kenaikan angka rawan pangan dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Apabila dilihat dari sisi jiwa/orang: kemiskinan, pendapatan, pengangguran, dan jumlah penduduk yang meningkat,
- b. Apabila dilihat dari sisi komoditas: Nilai Tukar Petani (NTP), Supply, Fluktuasi konsumsi pangan dari tahun ke tahun, Harga pangan pokok naik dari tahun ke tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung penurunan rawan pangan adalah kegiatan Pengembangan Desa/Kawasan Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan. Kegiatan penanganan daerah rawan pangan lebih difokuskan pada pencegahan dini daerah rawan melalui optimalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), walaupun kegiatan tersebut kurang berjalan sesuai dengan target, karena (a) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil analisis SKPG; (b) Provinsi dan Kabupaten tidak melakukan penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak terbentuk Tim Investigasi di beberapa daerah; (d) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti.

B. Penurunan Konsumsi Beras

Perkembangan konsumsi beras pada tahun 2010 –2013 cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan Tabel 3 dibawah ini, pada periode 2010–2013 konsumsi beras ditingkat rumah tangga mengalami penurunan dari 97,7 kg/kap/tahun menjadi 96,3 kg/kap/tahun (rata-rata penurunan sebesar 1,41 persen per tahun). Beras merupakan sumber karbohidrat yang dominan dikonsumsi oleh penduduk Indonesia karena beras dihasilkan hampir di seluruh wilayah nusantara, ekonomis dan praktis dalam penyiapan. Selain itu,

budaya makan dan anggapan sebagian besar masyarakat bahwa pangan pokok sumber karbohidrat yang berasal dari bahanselain beras masih mempunyai kesan inferior serta diidentikkan dengan kemiskinan.Hal ini menyebabkan penurunan konsumsi beras belum seperti yang diharapkan.Perkembangan konsumsi beras tahun 2010 – 2013 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2010 – 2013

Tahun	Konsumsi (Kg/Kap/Thn)	Target (%)	Realisasi (%)
2010	97,7	1,50	4,40
2011	101,7	1,50	-4,09
2012	96,6	1,50	5,01
2013	96,3	1,50	0,31
Rata-rata	98,08		1,41

Sumber :

Susenas 2004 - 2008; BPS diolah BKP;

*) Susenas 2009 – 2013; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran riil, oleh BKP.

Secara kuantitas perkembangan konsumsi pangan nasional selama tahun 2010 – 2013seperti tertera pada **Tabel 3**.Secara umum, laju rata-rata penurunan konsumsi beras selama tahun 2010 – 2013sudah menunjukkan pencapaian yang cukup baik yaitu tercatat sebesar 1,41 % per tahun atau 98,08 % dari target 1,5%.Penurunan konsumsi beras dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi makanan jadi asal beras di luar rumah seperti restoran, cafe, dan lain-lain.

Meskipun tren konsumsi beras mengalami penurunan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat.Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi.Kondisi ini menunjukkan belum beragamnya konsumsi penduduk secara umum. Diharapkan pola konsumsi pangan masyarakat dapat mengarah pada pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: (1) masih rendahnya daya beli masyarakat, (2) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang, (3) masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan, (4) kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu, (5) belum optimalnya kerjasama antar kementerian/lembaga dalam sosialisasi dan pengembangan upaya penganeekaragaman konsumsi pangan penduduk.

Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi beras dengan meningkatkan konsumsi pangan sumber karbohidrat yang berasal dari pangan lokal seperti umbi-umbian. Namun masih ada hambatan, antara lain : (a) Produksi pangan lokal masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga dipasar yaitu masih relatif lebih tinggi dari pada beras; (b) Jenis teknologi penyimpanan pangan lokal seperti umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat, (b) Keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal (seperti : penepungan) masih rendah; (d) Usaha yang sudah bergerak di bidang pengembangan dan pengolahan pangan lokal belum mampu memproduksi menurut skala ekonomi dan belum terdistribusi dengan baik, sehingga harga pangan produk olahan yang bersumber dari pangan lokal masih tinggi di tingkat pasaran akibatnya masyarakat belum mampu mengaksesnya.

Penurunan konsumsi beras merupakan kegiatan lintas sektor yang dipengaruhi oleh kinerja berbagai unit kerja/instansi lain. Dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan telah berupaya dengan kegiatan: (a) Pemberdayaan kelompok wanita dengan jumlah kelompok wanita P2KP melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (b) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), yang mendukung pengembangan teknologi pengolahan

pangan lokal; (c) Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sejak usia dini pada SD/MI; dan (d) Sosialisasi dan Promosi ke masyarakat umum.

Kedepan penurunan konsumsi beras perlu introduksi komponen kegiatan di dalam dan luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian, buah dan sayur. Upaya selanjutnya untuk meningkatkan penurunan konsumsi beras di masyarakat diperlukanketersediaan produk pangan pokok lokal seperti umbi-umbian yang memadai, dan pengelolaan distribusi yang baik, sehingga harga di pasar dapat ditekan. Untuk itu, diperlukan pengembangan usaha pengolahan pangan pokok lokal lainnya dengan nilai keekonomian yang memadai. Selain itu diperlukan upaya promosi untuk meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dan anak usia dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan, yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi pangannya yang sudah beragam. Selain itu, kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama karena kelompok sudah termotivasi dan mempunyai kemampuan kerja sama usaha kelompok.

C. Pola Pangan Harapan (PPH)

Penganekaragaman konsumsi pangan atau dikenal juga dengan istilah diversifikasi pangan merupakan upaya membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dalam konteks ini, penganekaragaman pangan sangat penting dan mendesak, karena untuk membangun masyarakat yang sehat, aktif dan produktif memerlukan kecukupan gizi yang memadai dengan jenis dan jumlah yang tepat. Kondisi saat ini menunjukkan pola konsumsi pangan penduduk Indonesia yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih terdapat ketimpangan atau belum mencapai kondisi ideal, yang ditandai dengan: masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras; masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah;

dan pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah.

Konsumsi jagung dalam kelompok padi-padian masih rendah dibanding konsumsi jenis padi-padian lain (beras dan terigu). Begitu juga dengan konsumsi jenis umbi-umbian terutama sagu dan jenis umbi lainnya masih rendah. Konsumsi pangan sumber protein hewani lebih banyak bersumber dari ikan, daging unggas dan telur. Kacang kedelai memiliki proporsi konsumsi yang lebih tinggi sebagai sumber protein nabati utama dalam pola konsumsi pangan penduduk. Komoditas minyak sawit dan kelapa merupakan jenis pangan dari kelompok minyak/lemak serta buah/biji berminyak yang memiliki proporsi konsumsi cukup besar dalam sumbangan energi pola konsumsi penduduk nasional. Gambaran konsumsi ini menunjukkan bahwa konsumsi penduduk Indonesia masih didominasi pangan sumber energi (sereal, minyak/lemak, dan buah/biji berminyak), dan masih kurang konsumsi pangan sumber vitamin mineral (sayur dan buah).

Tabel 4. Konsumsi Pangan Penduduk Indonesia Tahun 2010 – 2013.

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi (Kg/Kap/Tahun)			
	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)
I, Padi-padian				
a, Beras	99,7	101,7	96,6	96,3
b, Jagung	2,0	1,6	1,9	1,6
c, Terigu	10,2	10,8	9,8	10,1
II, Umbi-umbian				
a, Singkong	9,4	10,3	7,5	6,8
b, Ubi jalar	2,5	3,0	2,5	2,5
c, Kentang	1,9	1,6	1,5	1,6
d, Sagu	0,4	0,5	0,4	0,4
e, Umbi lainnya	0,4	0,7	0,5	0,4
III, Pangan Hewani				
a, Daging ruminansia	1,9	2,2	3,1	1,8
b, Daging unggas	5,0	5,3	4,9	5,0
c, Telur	8,0	7,9	7,8	7,3
d, Susu	2,3	2,3	1,9	2,3
e, Ikan	20,1	21,1	19,5	19,5
IV, Minyak dan Lemak				
a, Minyak kelapa	1,8	1,7	1,2	1,2
b, Minyak sawit	7,3	7,5	8,5	8,1
c, Minyak lainnya	0,2	0,2	0,1	0,2

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi (Kg/Kap/Tahun)			
	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)
V, Buah/biji berminyak				
a, Kelapa	3,0	2,7	2,5	2,2
b, Kemiri	0,5	0,5	0,4	0,4
VI, Kacang-kacangan				
a, Kedelai	7,7	8,3	7,8	7,8
b, Kacang tanah	0,6	0,4	0,3	0,3
c, Kacang hijau	0,4	0,3	0,3	0,3
d, Kacang lain	0,2	0,1	0,2	0,1
VII, Gula				
a, Gula pasir	10,0	9,6	8,4	8,6
b, Gula merah	1,0	0,9	0,7	0,7
VIII, Sayuran dan buah				
a, Sayur	61,7	61,1	59,4	56,9
b, Buah	34,9	29,1	31,6	30,2
IX, Lain-lain				
a, Minuman	15,0	16,7	16,7	17,4
b, Bumbu-bumbuan	3,6	3,8	3,6	3,5

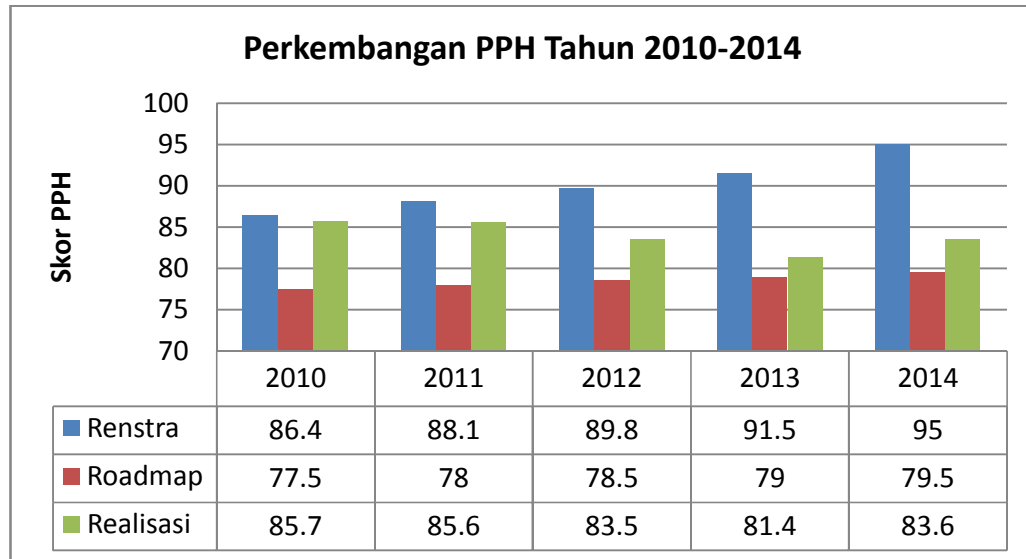
Sumber :

Susenas 2004 - 2008; BPS diolah BKP;

*) Susenas 2009 – 2013; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran riil, oleh BKP.

Salah satu indikator kualitatif konsumsi pangan ditunjukkan melalui pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kualitas konsumsi pangan berfluktuasi antar tahun, selama periode 2004–2013 kualitas konsumsi pangan penduduk cenderung meningkat dari 76,7 pada tahun 2004 menjadi 81,4 pada tahun 2013, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dimana diharapkan PPH dapat mencapai angka 95,0 pada tahun 2015 (Gambar 11). Untuk meningkatkan skor PPH diperlukan usaha yang optimal dan paralel antara ketersediaan pangan, akses pangan dan perubahan pola konsumsi pangan masyarakat mengarah pada pola anjuran PPH. Selain itu, dukungan kementerian/lembaga lingkuppertanian maupun instansi di luar Kementerian Pertanianserta pemerintah daerah sangat penting dan menentukan.

Grafik 11. Perkembangan PPH Tahun 2010 – 2014



Sumber :
Tahun 2014, Susenas 2009 – 2013; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran riil, oleh BKP.

Untuk mencapai kualitas konsumsi pangan yang lebih baik perlu ditingkatkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat antara lain: masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang, masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan, kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu, belum optimalnya kerjasama antar kementerian/lembaga, serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Selain itu, dari sisi ketersediaan umbi-umbian bahwa : (a) produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian dipasar; (b) keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan) belum mampu memproduksi secara besar-besaran, sehingga harga pangan karbohidrat bersumber dari pangan lokal masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat

belum mampu mengaksesnya; (c) teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat.

D. Stabilisasi Harga di Tingkat Petani

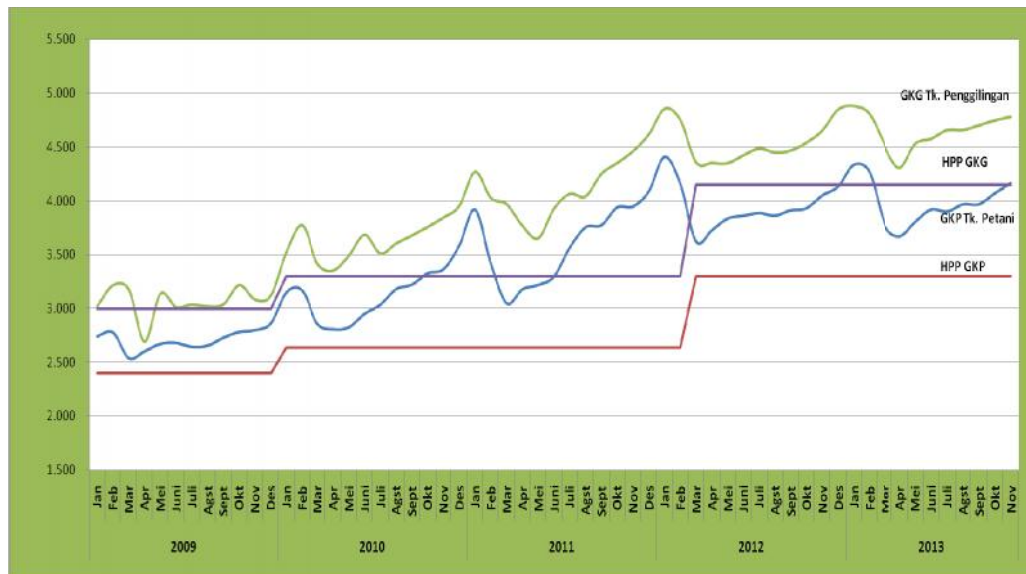
Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilitasnya harga pangan sangat dipengaruhi beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya beras dan kedelai. Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan. Berikut perkembangan rata-rata harga pangan nasional per komoditi tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani Tahun 2010– 2014.

Tahun	Harga di Tk Petani (Rp/kg)	% Perubahan thd HPP	CV	Insiden di Bawah HPP (%)
2010	3,123	18,3	8,0	10,9
2011	3,595	36,2	9,9	4,5
2012	3,948	25,0	5,3	4,2
2013	4,005	21,4	5,2	4,2
2014*)	4,412	27,5	4,4	1,6

Sumber: BPS, *) s,d Juni 2014

Grafik 12. Perkembangan Harga GKP di Tingkat Petani Tahun 2009 – 2013.

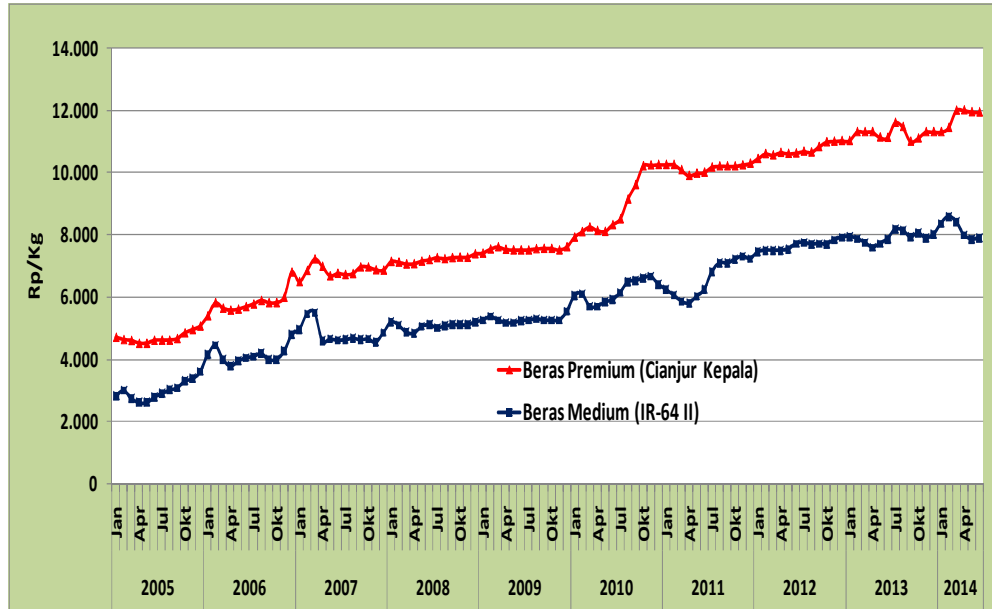


Pola perkembangan harga GKP di petani selama tahun 2010 – 2014 (s.d Juni) memiliki pola yang hampir sama setiap tahunnya (Gambar 12). Pola perkembangan harga beras kualitas premium di tingkat grosir lima tahun terakhir dari tahun 2010 -2014 cenderung stabil ($cv < 2\%$) kecuali tahun 2010 ($cv = 10,5\%$). Pada tahun 2010 terjadi perubahan iklim global sehingga menyebabkan pertanaman padi menjadi gagal panen. Tren perkembangan harga beras premium dari tahun-ketahun harga mengalami kenaikan dan harga cenderung turun pada saat musim panen (Maret – Mei), sementara itu pada MK (musim kemarau) harga mulai naik lagi. Hal ini dikarenakan panen raya padi di sebagian besar daerah sentra padi terjadi pada bulan februari hingga maret,

E. Stabilisasi Harga di Tingkat Konsumen

Pola perkembangan harga beras medium di tingkat grosir dari tahun 2010 – 2014 memiliki pola yang berbeda dari harga beras premium (Gambar 13). Pola perkembangan harga tahun 2011, 2013 dan 2014 cenderung sama yaitu cenderung stabil ($cv < 5\%$), sedangkan tahun 2010 sama dengan tahun 2011 yaitu cenderung fluktuatif ($cv 5,7\%$ dan $9,0\%$). Sementara itu, tren perkembangan harga beras medium dari tahun - ketahun memiliki tren yang sama dengan beras premium yaitu harga cenderung naik dari tahun ketahun,

Grafik 13. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri Tingkat Grosir 2005–2014.



Sumber : PIBC diolah BKP

Tabel 6. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri Tingkat Grosir 2010–2014.

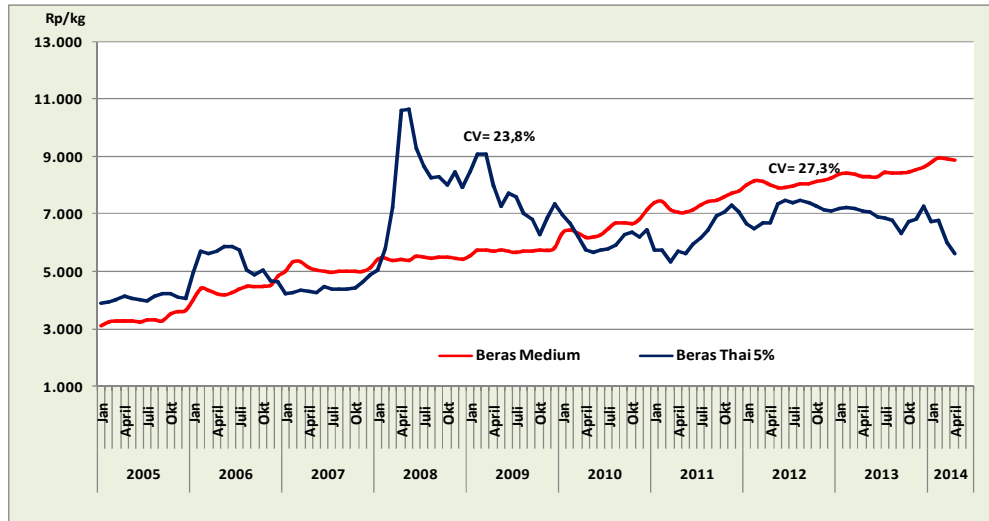
Tahun	Beras (Rp/Kg)		Koefesien Variasi (CV)(%)	
	Premium	Medium	Premium	Medium
2010	8.890	6.175	10,5	5,7
2011	10.144	6.580	1,3	9,0
2012	10.716	7.652	1,8	2,0
2013	11.244	7.914	1,6	2,1
2014*)	11.769	8.187	2,7	3,8

Sumber: PIBC, *) s,d Juni 2014

Perkembangan harga beras luar negeri (Thai 5%) selama periode 2005 – 2014 (s.d April) cenderung lebih stabil dibandingkan dengan harga beras dalam negeri (beras medium).Tren perkembangan harga beras dalam negeri mulai awal tahun 2010 hingga April 2014 memiliki tren naik dan harga beras selalu lebih tinggi dibanding harga beras luar negeri, dengan rata-rata harga

beras dalam negeri selama tahun 2010- April 2014 sebesar Rp 7,843/kg atau 19,85% diatas harga beras luar negeri (Thai 5%).

Grafik14.Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri danInternasional 2005–2014.



Sumber: Beras Medium (Kemendag), Beras Thai 5% (World Bank diolah BKP)

Perkembangan harga beras kualitas IR (IR I, IR II, IR III) di tingkat grosir dari tahun 2010 – 2014 semakin stabil (Tabel 7). Perkembangan harga beras kualitas IR pada tahun 2012, 2013 dan 2014 cenderung lebih stabil ($cv < 5\%$) jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010 ($Cv > 5\%$). Sedangkan, tren perkembangan harga beras kualitas IR (IR I, IR II, IR III) dari tahun - ketahun memiliki tren yang sama yaitu harga cenderung naik dari tahun ketahun.

Tabel 7. Perkembangan Harga Beras Kualitas IR di PIBC Tahun 2010 – 2014.

Tahun	Harga (Rp/Kg)			Koefesien Variasi (CV)(%)		
	IR-64 I	IR-64 II	IR-64 III	IR-64 I	IR-64 II	IR-64 III
2010						
2011						
2012						
2013						
2014						

2010	6,701	6,179	5,603	6,4	5,8	7,5
2011	7,234	6,580	6,138	6,6	9,0	8,4
2012	8,321	7,652	7,067	1,3	2,0	3,8
2013	8,459	7,914	7,200	1,9	2,1	2,9
2014*)	8,831	8,187	7,621	2,3	3,8	4,4

Sumber: PIBC, *) s,d Juni 2014,

4.2. Capaian Kinerja Program Aksi Badan Ketahanan Pangan.

A. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan/P2KP.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No, 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Perpres ini mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan penganekaragaman pangan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi. Perpres ini sudah ditindaklanjuti, dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal sebagai acuan yang lebih operasional dalam implementasinya.

Sebagai implementasi dari Perpres dan Permentan tersebut, Kementerian Pertanian tahun 2010 meluncurkan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) untuk mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

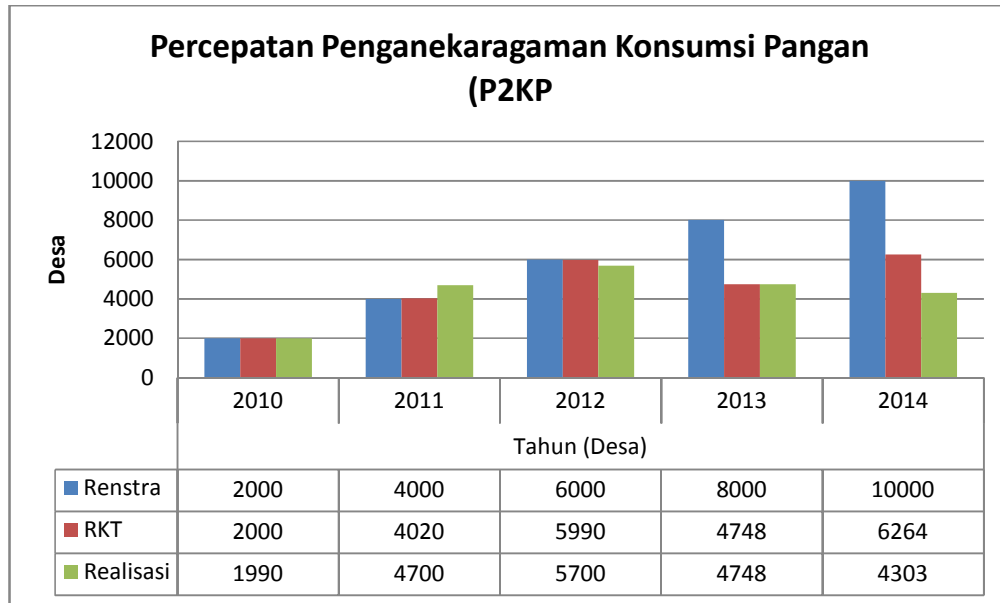
Tabel 8. Perkembangan Sasaran P2KP/KRPL Tahun 2010 – 2014.

Uraian	Tahun (Desa)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Renstra	2000	4000	6000	8000	10000

RKT	2000	4020	5990	4748	6264
Realisasi	1990	4700	5700	4748	4303

Grafik 15. Perkembangan kegiatan P2KP/KRPL tahun 2010–2014.

Posisi : Nopember 2014



Realisasi pencapaian sasaran kegiatan P2KP sesuai dengan sasaran pada Renstra Tahun 2010–2014 kecuali pada 2 tahun terakhir (Gambar 15) dikarenakan adanya pemotongan anggaran. Pada tahun 2011, realisasi melebihi target sebagai akibat dari *refocusing* kegiatan BKP untuk P2KP.

Tujuan dari pemanfaatan pekarangan adalah untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga, menumbuhkan kesadaran keluarga agar mengenali dan mengetahui sumber-sumber pangan yang ada disekitar kita, menumbuhkan kesadaran keluarga agar mau dan mampu memanfaatkan bahan pekarangan menjadi sumber pangan dan gizi keluarga, dan tentu saja untuk menambah asri serta keindahan lingkungan.

Pekarangan kalau dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang banyak karena pekarangan dapat menghasilkan berbagai bahan pangan yang bergizi tinggi, seperti sayuran, buah-buahan, ternak kecil, unggas dan ikan. Disamping itu, kalau pekarangan yang diusahakan dengan baik dapat sebagai sumber pendapatan/tabungan keluarga karena hasil pekarangan bukan hanya untuk dikonsumsi tetapi juga dapat dijual sebagai sumber pendapatan keluarga dan kalau ditata dengan baik dapat sebagai penambah keindahan rumah. Optimalisasi pekarangan ini dikembangkan secara intensif sejak tahun 2004 melalui kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

Selanjutnya, sejak tahun 2010, P2KP disempurnakan pendekatan pengembangannya. Melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal yang disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*), sehingga kelestarian alam tetap terjaga. Implementasi konsep inilah dikenal dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

KRPL adalah sebuah konsep kawasan yang secara optimal memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan. Melalui konsep KRPL, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian pangan sekaligus melestarikan sumber daya alam.

Kegiatan KRPL ini dilaksanakan pada tingkat desa dengan sasaran kelompok wanita yang diyakini mempunyai peran sangat besar dalam penentuan pola konsumsi pangan dalam rumah tangga. Dengan melakukan pemberdayaan intensif kepada ibu rumah tangga yang terwadahi dalam suatu kelompok, diharapkan terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan pada akhirnya akan terjadi perubahan pola

pikir serta perilaku dalam pola konsumsi pangan.

Untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di lapangan, maka pada setiap desa/kelompok KRPL difasilitasi oleh seorang pendamping baik dari seorang penyuluh PNS/penyuluh THL/swadaya/tokoh masyarakat dan pada setiap kabupaten ditunjuk seorang pendamping kabupaten/kota yang berfungsi sebagai koordinator pendamping desa. Baik pendamping kabupaten/kota maupun pendamping desa dalam melaksanakan tugas mendampingi kelompok diberikan pembekalan yang cukup baik dari sisi teknis kegiatan maupun manajemen kelompok.

Dalam konsep KRPL, tidak dibatasi berapa luasan lahan pekarangan setiap orang. Namun seluas apa pun pekarangan, dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan bagi keperluan keluarga, khususnya sayur-sayuran, yang bisa ditanam di pot, polybag atau barang-barang bekas seperti plastik, botol bekas, batok kelapa, bungkus detergen dan sebagainya.

Sedangkan untuk pemenuhan protein hewani dapat diupayakan dengan pemeliharaan ikan, itik atau ayam di pekarangan, Ikan dapat dipelihara di drum bekas, kolam terpal baik yang ditanam maupun kolam gantung. Bila lahan cukup luas, bisa ditanami bermacam-macam buah-buahan.

Dengan adanya anjuran pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal pekarangan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil pangan, dalam memperbaiki gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Manfaatnya sangat besar, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu Pemerintah telah menganjurkan agar memanfaatkan setiap jengkal tanah termasuk lahan tidur, galengan, maupun tanah kosong yang tidak produktif.

Pelaksanaan kegiatan KRPL ini memberikan banyak manfaat bagi pelakunya, baik secara individu maupun kelompok, seperti :

- (1) Kemudahan mengakses pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Banyak ibu rumah tangga yang selama ini membeli kebutuhan pangan keluarganya ke pasar dan harus mengeluarkan biaya transpor atau menunggu tukang sayur keliling, Namun setelah para ibu rumah tangga memanfaatkan pekarangannya justru yang terjadi adalah bahwa mereka tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk keluarga dan menghemat biaya transport ke pasar, tetapi justru mereka bisa menjual hasil pekarangannya kepada tukang sayur langganan mereka untuk dijual di desa lain. Misalnya di desa Semin Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
- (2) Mendukung pemenuhan gizi anggota keluarga dengan baik, Kecenderungan masyarakat yang belum memperhatikan kecukupan dan keseimbangan gizi keluarga yang salah satu faktor penyebab adalah, karena keterbatasan keuangan untuk membeli bahan pangan yang bergizi, sudah dapat diatasi dengan hasil pangan dari pekarangan yang telah memenuhi kecukupan gizi: karbohidrat, protein hewani dan nabati, vitamin dan mineral.
- (3) Penghematan pengeluaran rumah tangga untuk pembelian pangan karena sudah dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri. Kebutuhan bahan pangan sehari-hari seperti cabe, tomat, sayuran dan bumbu dapur bahkan ikan dan ayam serta telur sudah dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri, sehingga tidak harus membeli lagi dan dananya dapat dihemat untuk keperluan rumah tangga yang lainnya.
- (4) Penambahan pendapatan rumah tangga apabila produksi masih berlebih setelah kebutuhan keluarga terpenuhi. Kenyataan membuktikan bahwa apabila potensi pekarangan dapat dioptimalkan pemanfaatannya akan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi rumah tangga.
- (5) Membantu pelestarian lingkungan karena adanya upaya pemanfaatan limbah rumah tangga untuk media tanam seperti: barang-barang bekas (botol minuman, kaleng, bungkus minyak goreng dan deterjen, ban bekas, dll), sabut dan batok kelapa, pembuatan kompos, dan lain-lain.

Bahkan dapat mengurangi jejak karbon karena pangan sudah dapat diakses dengan mudah tanpa menempuh jarak yang jauh dalam pendistribusian pangan untuk sampai ke tangan konsumen.

Namun demikian, kegiatan KRPL belum memberikan dampak terhadap keberagaman pangan secara makro yang diukur dengan PPH. Hal tersebut dikarenakan pengaruh kegiatan KRPL ini masih terbatas pada kelompok penerima kegiatan KRPL belum mencakup masyarakat secara umum. Diperlukan replikasi kegiatan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas. Selain itu, untuk meningkatkan keberagaman pangan juga diperlukan dukungan sosialisasi/promosi tentang peran penting penganeekaragaman pangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hal tersebut.

B. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Dalam mendukung stabilisasi harga pangan, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan Penguatan LDPM dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani/kelembagaan petani/Gapoktan padi dan jagung terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan di saat paceklik. Melalui kegiatan Penguatan-LDPM yang dilaksanakan sejak tahun 2009, pemerintah menyalurkan dana Bantuan Sosial dari APBN kepada Gapoktan untuk memberdayakan kelembagaan Gapoktan agar mampu mendistribusikan hasil produksi pangan dari anggotanya sehingga harga yang diterima di tingkat petani maupun di wilayah stabil, serta menyediakan cadangan pangan dalam rangka penyediaan aksesibilitas pangan bagi anggotanya. Melalui penguatan modal usaha, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu secara swadaya membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang distribusi pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan disaat paceklik.

Dukungan dana Bansos yang bersumber dari APBN pada kegiatan Penguatan-LDPM hanya diberikan kepada Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu pada tahun pertama dan tahun kedua. Sementara itu pada tahun ketiga, Gapoktan hanya menerima pembinaan dan/atau bimbingan dari pendamping, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi. Selama periode 2009-2013, jumlah Gapoktan yang telah melaksanakan kegiatan Penguatan LDPM adalah 1340 Gapoktan di 28 Provinsi. Keberhasilan yang telah dicapai pada periode 2009-2013 pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM seperti diilustrasikan pada **tabel 9**:

Tabel9. Perkembangan Pelaksanaan Penguatan-LDPM periode 2010-2014.

Tahapan	Jumlah Gapoktan				
	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Penumbuhan	204	235	281	75	38
Pengembangan	545	237	224	219	117
Kemandirian		512	220	224	225

Keterangan :

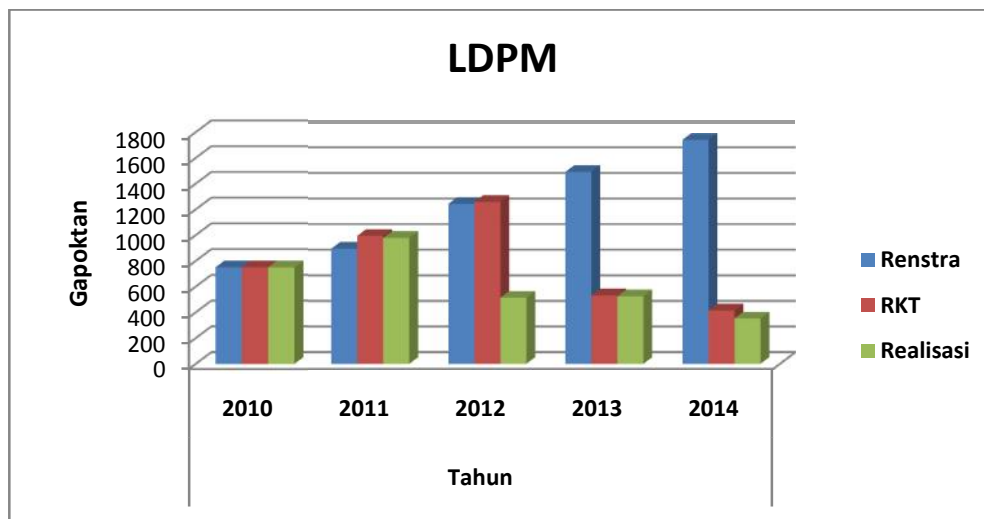
- 1) $237 = 204 + 33$ (33 Gapoktan tahun 2010 kembalikan dana Bansos Tahap Pengembangan untuk diluncurkan tahun 2011)
- 2) $220 = 237 - 17$ (17 Gapoktan tahun 2011 kembalikan dana Bansos Tahap Pengembangan)
- 3) $224 = 235 - 11$ (11 Gapoktan tahun 2012 kembalikan dana Bansos Tahap Pengembangan)
- 4) 1 Gapoktan tahun 2013 kembalikan dana bansos Tahap Penumbuhan
- 5) $219 = 281 - 62$ (62 Gapoktan tahun 2013 kembalikan dana Bansos Tahap Pengembangan)

- 6) Tahun 2014 perubahan sasaran karena adanya penghematan anggaran,

Tabel10. Perkembangan Pelaksanaan dan Realisasi Penguatan LDPM 2010 – 2014 per Nopember 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Renstra	750	900	1250	1500	1750
RKT	750	1000	1265	535	417
Realisasi	749	984	516	528	354

Grafik16. Perkembangan Pelaksanaan LDPM tahun 2010 – 2014.



Selama periode 2010 – 2014 ada sekitar 956 Gapoktan yang sudah masuk ke dalam tahap Kemandiran dari total 1341 Gapoktan (71,29 persen). Pada saat ini masih ada 281 Gapoktan dalam tahap Pengembangan (20,95 persen) dan 75 Gapoktan masuk ke dalam Tahap Penumbuhan (5,59 persen). Pada tahun 2010 dan 2011, realisasi kegiatan LDPM sesuai dengan target renstra. Namun mulai tengah tahun 2012 realisasi lebih rendah dari target sebagai

akibat dari pengurangan anggaran kegiatan LDPM karena adanya *refocusing* kegiatan BKP.

Tahun 2010 merupakan tahun kedua pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, pada tahun kedua ditumbuhkan sebanyak 204 Gapoktan yang akan menerima dana Bansos sebesar Rp 150 juta pada tahap pertama dan 545 Gapoktan yang direncanakan masuk ke Tahap Pengembangan dan akan menerima dana bansos tahap kedua sebesar Rp 75 juta. Sebelum dana bansos tahap kedua disalurkan ke Gapoktan, tim Pembina provinsi dan tim teknis kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing Gapoktan untuk masuk ke Tahap Pengembangan. Hingga akhir tahun 2010, 204 gapoktan yang ditumbuhkan semuanya menerima dana bansos 150 juta sedangkan dari 545 gapoktan yang direncanakan masuk ke tahap pengembangan hanya 512 Gapoktan yang layak mendapatkan tambahan penguatan modal usaha sebesar Rp 75 juta sedangkan 33 Gapoktan lainnya tidak layak untuk mendapatkan tambahan dana bansos sehingga dana bansos tersebut dikembalikan ke kas Negara untuk diluncurkan pada tahun 2011.

Tahun 2011 merupakan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, dimana pada tahun ketiga ditumbuhkan sebanyak 235 Gapoktan, 237 Gapoktan yang direncanakan memasuki tahap Pengembangan (204 gapoktan yang ditumbuhkan tahun 2010 dan 33 Gapoktan merupakan luncuran dari Gapoktan yang ditumbuhkan tahun 2009), dan 512 Gapoktan yang masuk tahap Kemandirian. Pada akhir tahun 2011 dari 235 gapoktan yang ditumbuhkan semuanya menerima dana bansos 150 juta sedangkan dari 237 Gapoktan hanya 220 Gapoktan yang layak untuk masuk tahap Pengembangan dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta, dan selanjutnya dana bansos yang telah dialokasi bagi 17 Gapoktan dikembalikan ke kantor Kas Negara.

Tahun 2012 merupakan tahun keempat pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM. Pada tahun 2012 penguatan LDPM dilaksanakan terhadap 1,265

gapoktan yang terdiri dari: (1) penguatan LDPM tahap penumbuhan 281 Gapoktan, (2) penguatan LDPM tahap pengembangan 235 Gapoktan, (3) penguatan LDPM tahap kemandirian 220 Gapoktan dan (4) tahap pasca kemandirian 512 Gapoktan. Gapoktan yang masuk pada Tahap Penumbuhan akan menerima dana bansos sebesar Rp 150 juta, tahap Pengembangan menerima dana bansos sebesar Rp 75 juta, dan tahap Kemandirian dan Pasca Kemandirian tidak lagi menerima dana bansos namun provinsi dan kabupaten/kota tetap melakukan pembinaan, Dari 281 gapoktan yang diusulkan oleh kabupaten/kota ke provinsi, setelah dilakukan evaluasi sesuai persyaratan pedoman umum (pedum) semua gapoktan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bansos penguatan modal sebesar 150 juta. Sementara itu dari 235 gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 2011 setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan, hanya 224 gapoktan yang layak untuk masuk tahap pengembangan dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta.

Tahun 2013 merupakan tahun kelima pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dimana pada tahun kelima ditumbuhkan sebanyak 75 Gapoktan, 281 Gapoktan yang direncanakan memasuki tahap Pengembangan (gapoktan yang ditumbuhkan tahun 2013) dan 224 Gapoktan masuk ke tahap Kemandirian. Dari 75 gapoktan yang diusulkan oleh kabupaten/kota ke provinsi, setelah dilakukan evaluasi sesuai persyaratan pedoman umum (pedum) 1 gapoktan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bansos penguatan modal sebesar 150 juta, Sementara itu dari 281 gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 2012 setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan, hanya 219 gapoktan yang layak untuk masuk tahap pengembangan dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta.

Berdasarkan Kajian Evaluasi Dampak Penguatan LDPM Tahun 2013 dapat disimpulkan jika dukungan pemerintah dalam bentuk Bansos Penguatan-LDPM terbukti dapat menjaga stabilitas harga pangan ditingkat petani sebagaimana ditampilkan pada Tabel 11. Dari tabel tersebut terlihat jika harga rata-rata GKP di tingkat petani pada Gapoktan pelaksana Penguatan-LDPM lebih tinggi (Rp 3,695,50) dibandingkan rata-rata nasional harga GKP di tingkat petani (Rp 3,371,83). Harga GKP pada Gapoktan pelaksana

Penguatan-LDPM juga relatif lebih stabil dibandingkan dengan harga GKP petani pada umumnya yang ditunjukkan dari nilai CV yang jauh lebih rendah dari nilai CV harga GKP petani umumnya.

Tabel 11. Perbandingan Tingkat Harga dan Fluktuasi Harga GKP Tahun 2012 Tingkat Gapoktan LDPM.

Uraian	Harga Rata-Rata (Rp/Kg)	CV (%)
GKP Gapoktan LDPM	3695,50	3,00
GKP Petani	3371,83	7,76

Keterangan: HPP GKP tahun 2012 adalah Rp 3,300,- di tingkat petani (Berdasarkan Inpres No 3/2012)

Dampak kegiatan Penguatan-LDPM juga terlihat dari peningkatan peran Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan, yang meningkatkan kemudahan petani (anggota) dalam mengakses pangan pada saat terjadi kelangkaan pangan. Beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan kinerja pengelolaan cadangan pangan adalah: (i) jumlah Gapoktan yang membentuk Unit Cadangan Pangan meningkat 67,3%, unit ini melaksanakan pengadaan cadangan pangan untuk disimpan dan dijual pada harga yang layak serta sebagian untuk cadangan pangan, (ii) pembangunan gudang yang dilaksanakan seluruh (100%) Gapoktan penerima dana bansos Penguatan-LDPM yang mendorong mekanisme penyimpanan cadangan pangan, serta (iii) peningkatan akses pangan dimana cadangan beras dimanfaatkan oleh 39% anggota aktif dan 24% anggota tidak aktif dengan rata-rata volume peminjaman 26kg/kk/bulan untuk anggota aktif dan 12 kg/kk/bulan untuk anggota tidak aktif. Alokasi penyaluran cadangan beras dilakukan pada waktu : paceklik 57,9%; ada bencana 26,3%; sewaktu-waktu 15,8%.

Dari sisi kelembagaan, pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada Gapoktan mampu memberikan dampak positif antara lain : (1) Peningkatan jumlah anggota tetap Gapoktan sebesar 18% dari sebelum adanya program bansos Penguatan-LDPM; (2) Peningkatan transparansi keuangan Gapoktan, dimana 94,44% anggota mengetahui penggunaan dana bansos dan 62,70% mengetahui saldo kas Gapoktan.

Dukungan dana bansos Penguatan-LDPM juga berpengaruh positif dalam membangun perspektif anggota Gapoktan dalam pengembangan agribisnis. Sesudah mengikuti Penguatan LDPM, persentase gapoktan yang melakukan kegiatan yang bersifat off-farm meningkat secara signifikan, yaitu jual-beli gabah/beras/jagung (meningkat 50%), pengolahan (meningkat 35%), dan pengelolaan cadangan (meningkat 55%).

Rata-rata saldo akhir buku kas dana Bansos LDPM saat survey adalah Rp 83 juta uang kas, serta Rp 34 juta rekening bank. Keberadaan saldo akhir ini merupakan indikator utama bahwa Gapoktan peserta Penguatan LDPM sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Selama masa proyek berjalan 4 tahun, Gapoktan memperoleh keuntungan sebanyak Rp 46, 7 juta berarti rata-rata Rp 11,7 juta per tahun, atau 6,74% per tahun. Memang angka ini di bawah bunga Bank 8% per tahun. Tetapi perlu diingat bahwa masih ada keuntungan lain yang belum diperhitungkan yaitu peningkatan *Tangible assets* dan *Intangible assets*.

Dampak lain yang dapat terlihat adalah Gapoktan dapat memberikan pekerjaan kepada 24 ibu-ibu rumah tangga dan 8 orang laki-laki. Mereka mendapatkan upah Rp 17.500-Rp 20.000 untuk wanita dan Rp 32.500-35.000 per hari untuk laki-laki. Pekerjaan yang dilakukan antara lain pengeringan gabah, penggilingan gabah menjadi beras, sortasi beras terhadap kotoran yang terbawa seperti batu-batu kecil, sortasi beras pecah dan beras yang utuh serta pengepakan.

Dari kegiatan yang diinisiasi Badan Ketahanan Pangan melalui penguatan – LDPM, ternyata tidak hanya mampu melindungi dan memberdayakan petani, tetapi para petani dan Gapoktan telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di sisi lain, masyarakat sekitar Gapoktan juga telah memperoleh dampak ikutan, berupa mata pencaharian, Semua ini, tentu berkontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

C. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).

Pada tahun 2009, dicanangkan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di masyarakat, pengembangan cadangan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan saat ini, oleh sebab itu menjadi sangat mendesak untuk dikembangkan. Beberapa alasan yang mendasari adalah : (a) Bank Dunia pada tahun 2008 memperingatkan bahwa cadangan pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awal mengingat cadangan pangan dunia turun hampir setengahnya; (b) situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan; (c) masa panen tidak merata antar waktu dan daerah; dan (d) adanya beberapa daerah yang terisolir pada waktu-waktu tertentu (musim kering, musim, ombak besar dan sebagainya) membutuhkan kerawanan pangan yang serius dan komperhensif; serta (e) banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah, Disamping itu yang paling utama adalah masih cukup besar jumlah penduduk yang mengalami kerawanan pangan.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan, kegiatan ini dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok. Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada dikelompoknya, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk 1) meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama

yang mengalami kerawanan pangan; 2) Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan; 3) meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui dana APBN tahun 2009 pada tahun berikutnya melalui DAK Bidang Pertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana Bansos, sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok melalui dana Bansos.

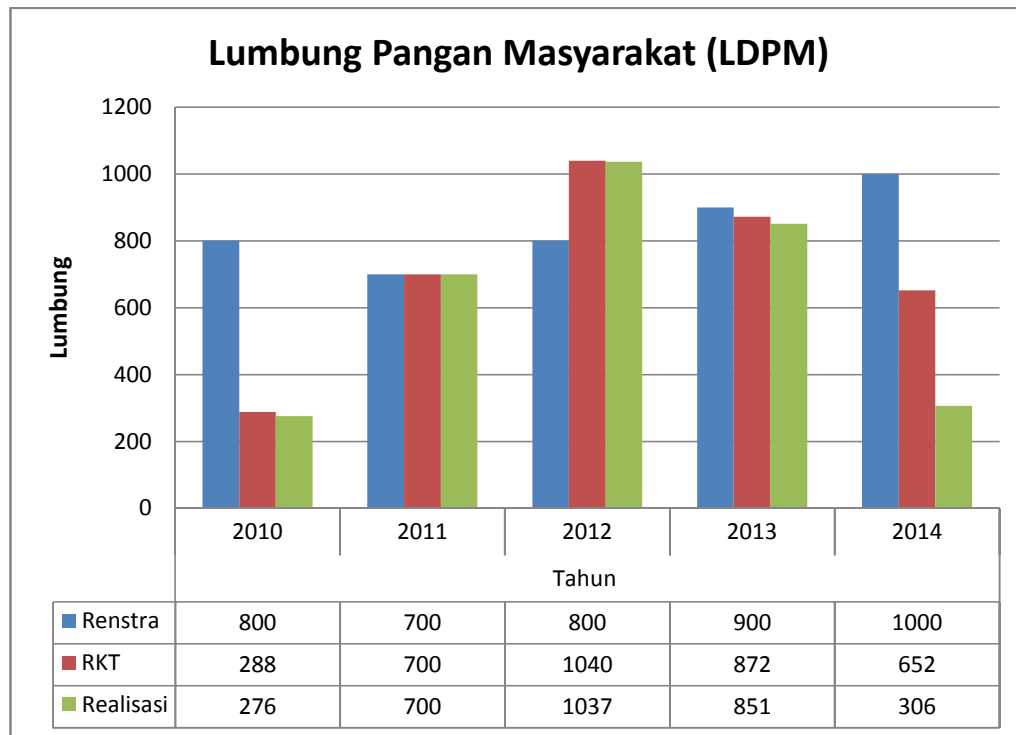
Sampai dengan tahun 2012 telah dibangun fisik lumbung pangan masyarakat sebanyak 1.660 lumbung baik melalui dana APBN maupun DAK Bidang Pertanian dan pada tahun 2013 akan dibangun sebanyak 873 lumbung pangan melalui DAK Bidang Pertanian Tahun 2013, total lumbung yang dibangun keseluruhannya adalah 2.533 unit sebaran per tahunnya, seperti pada Grafik 17 dibawah ini :

Tabel 12. Perkembangan Pelaksanaan Lumbung Pangan Masyarakat 2010 – 2014.

Posisi : Nopember 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Renstra	800	700	800	900	1000
RKT	288	700	1040	872	652
Realisasi	276	700	1037	851	306

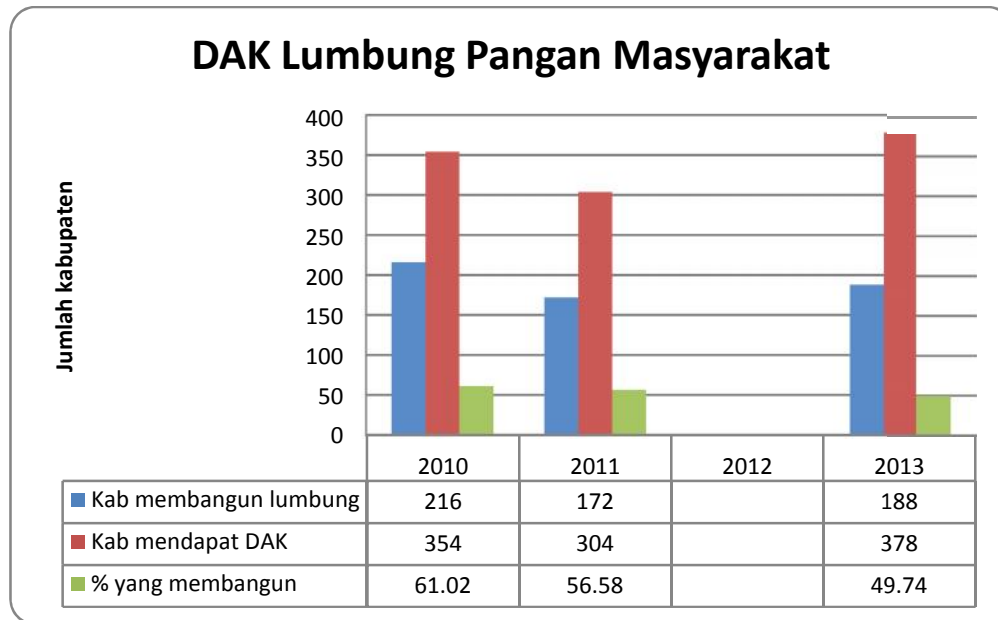
Grafik 17. Perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2010 – 2014.



Secara umum, realisasi kegiatan LPM sesuai dengan target renstra, kecuali pada tahun 2010 dan 2014 sebagai akibat perubahan kebijakan pendanaan pembangunan gudang LPM dari APBN menjadi DAK dan pengurangan anggaran kegiatan LPM karena adanya *refocusing* kegiatan BKP.

Sejak tahun 2010, berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pertanian, DAK juga dapat dipergunakan untuk pembangunan fisik lumbung pangan. Rincian Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian untuk pembangunan lumbung pangan dapat dilihat pada grafik 18 berikut ini.

Grafik 18. Perkembangan DAK Lambung Pangan Masyarakat Tahun 2010 – 2014.



Penggunaan DAK Bidang Pertanian oleh pemerintah kabupaten untuk pembangunan lumbung pangan selama 3 tahun sekitar 61,02 persen, dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, pada tahun 2010 dari sebesar 61,02 % menjadi 49,74 % pada tahun 2013, dari 354 Kabupaten yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Pertanian tahun 2010, hanya 216 kabupaten yang menggunakan dana tersebut untuk pembangunan fisik lumbung, sedangkan pada tahun 2011 hanya 172 kabupaten.

Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah menghimbau pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan alokasi DAK Bidang Pertanian untuk pembangunan lumbung pangan yang dapat digunakan dalam mengantisipasi kerawanan pangan atau kekurangan pasokan pangan pada periode-periode tertentu.

Pada tahun 2012, pembangunan fisik lumbung pangan masyarakat hanya dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka percepatan Papua dan Papua Barat melalui dana dekonsentrasi (APBN), sedangkan pembangunan fisik lumbung pangan masyarakat melalui DAK tahun 2012 sementara tidak dilakukan, mengingat masih banyak lumbung yang belum diisi cadangan pangan, selain itu DAK tahun 2012 difokuskan untuk pembangunan fisik gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten.

Berdasarkan database, lumbung yang telah dibangun dari tahun 2009 – 2012 sebanyak 1,660 unit dan difasilitasi melalui dana APBN sebanyak 1,566 kelompok, sedangkan sisanya melalui APBD I dan APBD II. Rincian kelompok per provinsi per tahun dapat dilihat pada lampiran 3.

Tabel 13. Jumlah kelompok lumbung pangan per tahapan tahun 2009 –2014.

Tahapan	TAHUN (Jumlah Kelompok)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Penumbuhan	690	682	9		
Pengembangan	276	425	620	245	90
Kemandirian		275	408	619	245

Kelompok yang telah masuk pada tahap pengembangan sebanyak 1.566 kelompok yang telah diberikan dana bansos untuk pengisian cadangan pangan selanjutnya setelah dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelompok tahap pengembangan dan yang dinyatakan dapat masuk tahap kemandirian sebanyak 1.302 kelompok, kelompok ini mendapatkan penambahan dana bansos untuk penguatan modal dalam rangka pengembangan usaha kelompok.

D. Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Kegiatan Demapan merupakan: (a) salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan dari wilayah terkecil; (b) kegiatan lintas sektor yang dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan sinergitas antar instansi dan *stakeholders*; dan (c) wujud integrasi pengembangan program pembangunan dari pusat, propinsi, dan kabupaten di pedesaan.

Kegiatan Demapan umumnya diarahkan pada wilayah yang mempunyai proporsi penduduk miskin tinggi dan beresiko terhadap terjadinya kerawanan pangan dengan karakteristik: (a) kualitas sumberdaya masyarakat rendah, (b) penyediaan sumberdaya modal terbatas, (c) akses teknologi rendah, dan (d) infrastruktur pedesaan masih kurang.

Rata-rata jumlah rumah tangga miskin (RTM) penerima manfaat mengalami pertumbuhan sebesar 32 % per tahun. Perkembangan lokasi jumlah RTM, kelompok, desa pelaksana, kabupaten dan provinsi dapat dilihat pada **Tabel 14**.

Tabel 14. Perkembangan Lokasi dan Kelompok Desa/Kawasan Mandiri Pangan.

Tahun	Provinsi	Kab	Kawasan	Desa	Kelompok	Total RTM Dibina
2010	33	378	0	2.013	9.425	235.625
2011	33	399	0	2.851	13.255	331.375
2012	33	399	0	2.851	14.790	369.750
2013	13	60	109*	371	1.113**)	376.290
2014	13	59	107*	359	1.077**)	397.830

Keterangan:
*) Tahun 20

13 PenghematanSasarandari 121 kawasanmenjadi 109 kawasan.danTahun 2014 PenghematanSasarandari 109 menjadi 107.

**) Rata-rata 1 desa 3 kelompok.danrata-rata 1 kelompok 20 anggota

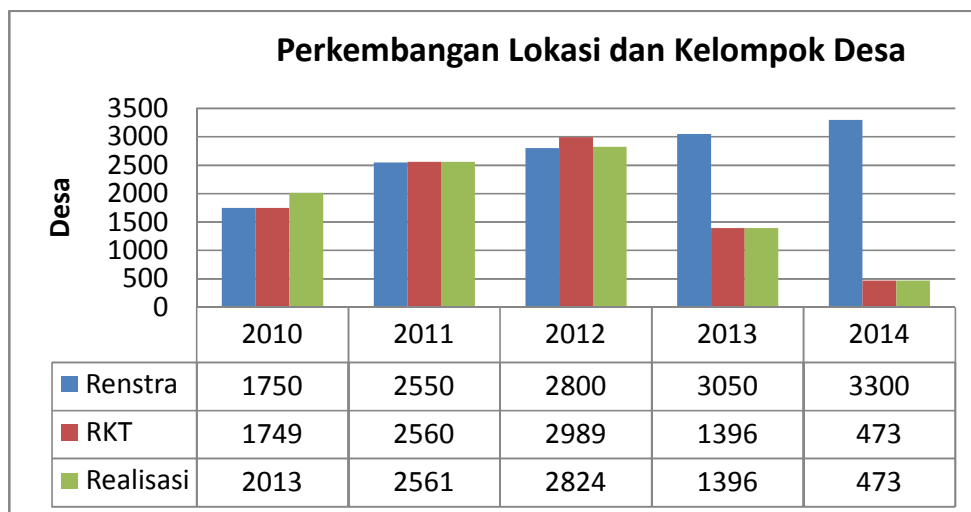
Tabel15.PerkembanganLokasidanKelompokDesa/Kawasan MandiriPangan per Nopember 2014.

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Renstra	1750	2550	2800	3050	3300
RKT	1749	2560	2989	1396	473
Realisasi	2013	2561	2824	1396	473

Padatahun 2013.KegiatanDesaMandiriPangandikembangkandalam 2 (dua) model.yaitu (1) KegiatanDesamapanReguler yang merupakankelanjutanpembinaandaridesa yang sudahada.dan (2) KegiatanKawasanMandiriPangan di 121 kawasandenganjumlahdesa rata-rata 3 desa per kawasan.Namunpadapertengahantahunterjadipenghematan BBM sehinggasarannyaberubahmenjadi 109 kawasanataujumlahrumahtanggamiskin (RTM) sebanyak 6.540 KK.Dengandemikiansampaitahun 2013 jumlah RTM yang sudahdiberdayakanmelaluikegiatanini sebanyak 376.290 KK ataumengalamipeningkatan rata-rata sebesar 75.258 KK/tahun.

Grafik 19.

PerkembanganLokasidanKelompokDesa/KawasanMandiriPangan.



Pada tahun 2014, kegiatan Desa Mandiri Pangan masih dikembangkan dalam 2 (dua) model, yaitu (1) Kegiatan Desa Mapan Reguler yang merupakan kelanjutan pembinaan di desa yang sudah ada dan (2) Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di 109 kawasan dengan jumlah desa rata-rata 3 - 5 desa per kawasan. Namun pada pertengahan tahun terjadi penghematan anggaran untuk subsidi BBM sehingga sasaran berubah menjadi 107 kawasan atau jumlah rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 21.540 KK. Dengan demikian sampai tahun 2014 jumlah RTM yang sudah diberdayakan melalui kegiatan ini sebanyak 3 KK atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 75.258 KK/tahun. Secara umum realisasi kegiatan Demapan sesuai dengan target Renstra kecuali pada tahun 2013 dan 2014 sebagai akibat *refocusing* program BKP yang disesuaikan dengan 4 target sukses pembangunan pertanian (Peningkatan Diversifikasi Pangan).

Pemanfaatan dan abansos digunakan untuk usaha di bidang on farm (60 %) off farm (14 %) dan non farm (26 %). Usaha di bidang pertanian (*on farm*) antara lain: budidaya tanaman sawa, tanaman buah, perikanan dan pembibitan, dan peternakan. Usaha di bidang pengolahan pangan (*off farm*) antara lain: olahan hasil pertanian, olahan hasil perikanan, dan olahan hasil perikanan. Usaha di luar pertanian (*non*

farm).Antaralain :simpanpinjam, anekajenisdagang,jualbeli, kerajinan, batik,ukirankayu, ukiran rotan dan pembuatanmebel.

Pada tahun 2012,Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Badan Litbang Pertanian bekerjasama untuk menyusun instrumen evaluasi dampak dampak penurunan kemiskinan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan.Kajian dilakukan di 25 provinsi, 139 kabupaten/kota, di 270 desa, terhadap 3858 anggota kelompok afinitas dan 3785 diluar anggota kelompok afinitas dengan metode FGD dan dukungan data skunder untuk menentukan tingkat tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.Indeks kemiskinan rumah tangga miskin ditentukan oleh dua kelompok indikator yaitu: "kondisi rumah tinggal" dan "kondisi sosial ekonomi" keluarga.

Dari hasil analisis yang mempergunakan IRM (Indeks Rumahtangga Miskin) terlihat ada perubahan kelompok keluarga sangat miskin menjadi miskin. keluarga miskin menjadi kurang sejahtera dan keluarga kurang sejahtera menjadi sejahtera.Secara nasional anggota kelompok afinitas yang masuk kategori keluarga sangat miskin, miskin, kurang sejahtera dan sejahtera sebelum mengikuti kegiatan Demapan masing-masing sebesar 15,54 persen; 57,49 persen; 25,74 persen dan 1,23 persen (Tabel 5). Persentase kelas keluarga miskin ini berubah menjadi lebih baik atau mengalami penurunan persentase pada keluarga miskin dan sebaliknya meningkat pada keluarga yang masuk kategori sejahtera. Anggota keluarga afinitas sangat miskin turun 10,55 persen keluarga afinitas miskin turun 15,25 persen dan keluarga kurang sejahtera mengalami kenaikan sebesar 16,70 persen. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga sejahtera yang sebelumnya hanya 1.23 persen setelah ikut program Desa Mapan naik menjadi 10,33 persen.

Keluarga miskin paling banyak terdapat di luar pulau Jawa, baik pada anggota kelompok afinitas maupun yang bukan anggota kelompok afinitas. Di luar pulau Jawa baik pada awal menerima kegiatan sampai tahun 2012 paling banyak adalah keluarga miskin dan persentasenya mengalami perubahan

dari 61,10 persen menjadi 43,69 persen. Keluarga sangat miskin berkurang dari 15,81 persen menjadi 5,15 persen. Keluarga sejahtera naik dari 21,88 persen menjadi 43,28 persen dan keluarga sejahtera naik dari 1,21 persen menjadi 7,88 persen. Hal yang sama juga terjadi di kelompok afinitas yang ada di pulau Jawa. dimana keluarga miskin yang awalnya sebesar 43,06 persen turun menjadi 35,43 persen; keluarga sangat miskin menjadi 4,36 persen dari 14,48 persen. Meskipun hanya sedikit tetapi persentase keluarga kurang sejahtera mengalami penurunan dari 41,17 persen menjadi 39,08 persen. Sebaliknya keluarga sejahtera meningkat cukup tajam dari 1,30 persen menjadi 20,13 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Dinamika Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Desa Mapan menurut Wilayah di Indonesia. Awal Program Tahun 2012.

No	Wilayah/Uraian	Anggota KA			Bukan anggota KA
		Awal Program	2012	+/-	2012
1	Jawa				
	• Sangat Miskin (%)	14,48	4,36	-10,12	7,70
	• Miskin (%)	43,06	36,43	-6,62	44,25
	• Kurang Sejahtera (%)	41,17	39,08	-2,09	28,03
	• Sejahtera (%)	1,30	20,13	18,83	20,03
2	Luar Jawa				
	• Sangat Miskin (%)	15,81	5,15	-10,66	12,56
	• Miskin (%)	61,10	43,69	-17,41	46,13
	• Sejahtera (%)	1,21	7,88	6,67	5,92
3	Indonesia				
	• Sangat Miskin (%)	15,54	4,99	-10,55	11,75
	• Miskin (%)	57,49	42,24	-15,25	45,81
	• Kurang Sejahtera (%)	25,74	42,44	16,70	34,16
	• Sejahtera (%)	1,23	10,33	9,10	8,27

Keterangan: Analisis data didasarkan 5 provinsi di Jawa dan 20 provinsi di Luar Jawa
Sumber:

1. Jawa: rataan dari 5 provinsi; (Jabar. Banten. Jateng. DIY. Jatim)
2. Luar Jawa: rataan dari 20 provinsi (Aceh. Sumut. Sumsel. Sumbar. Riau. Bengkulu. Babel. Lampung. Kepri. Kaltim. Kalsel. Sulsel. Sultra. Sulteng. Sulbar. Gorontalo. NTT. NTB. Maluku. Papua)

Dari hasil analisis dampak Desa Mapan terhadap dinamika dan komparasi tingkat kemiskinan rumah tangga diperoleh informasi penting sebagai berikut:

- (1) Di Jawa dengan posisi awal tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Desa

Mapan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap peningkatan rumah tangga dengan kategori “sejahtera”, yaitu dari 1,30% menjadi 20,13%; (2) Di luar Jawa dengan posisi awal tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Desa Mapan memberikan dampak positif yang relatif signifikan terhadap penurunan proporsi rumah tangga dengan katagori “sangat miskin” dan “miskin”, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan yang besar pada rumah tangga yang katagori “kurangsejahtera” dari 21,88% menjadi 43,28%; (3) Secara agregat nasional dapat disimpulkan telah terjadi penurunan rumah tangga miskin, dan pada saat bersamaan terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan rumah tangga sejahtera dengan adanya Desa Mapan. Secara nasional rumah tangga “sangat miskin” menurun dari 15,54% menjadi 4,99% dan rumah tangga “sejahtera” meningkat dari 1,23% menjadi 10,33%

Peningkatan kesejahteraan salah satunya ditunjukkan dari peningkatan penghasilan. Penghasilan keluarga rata-rata Rp. 500.000 perbulan merupakan penghasilan yang paling banyak di anggota kelompok afinitas (41,05%) maupun yang bukan kelompok afinitas (35,62%). Tetapi setelah adanya bantuan permodalan untuk usaha. penghasilan anggota kelompok afinitas mulai mengalami peningkatan. yaitu masing-masing: keluarga yang penghasilannya kurang dari Rp. 500.000 berkurang dari 41,05% menjadi 24,27% ; penghasilan Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 meningkat dari 37,76% menjadi 36,26% : penghasilan Rp. 1 juta s.d. Rp. 2 juta meningkat dari 16,40% menjadi 27,17% dan penghasilan yang lebih dari Rp. 2 juta meningkat dari 15,99% menjadi 26,63% serta penghasilan yang lebih Rp 2 juta meningkat dari 5,19% menjadi 12,84%.

E. Dewan Ketahanan Pangan.

Berbicara masalah ketahanan pangan.tidak cukup hanya masalah produksi.tetapi produksi tersebut harus bisa didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air agar masyarakat dapat mengakses pangan dan pangan yang dikonsumsi harus beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal.Melihat posisinya yang sedemikian kompleks jelas bahwa pembangunan ketahanan

pangan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi, tetapi melibatkan multi sektor dan disiplin ilmu pengetahuan.

Menyadari tugas yang sangat kompleks tersebut, peningkatan ketahanan pangan di suatu wilayah sangat membutuhkan kerjasama, dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perguruan Tinggi swasta maupun Masyarakat. Kerjasama ini sangat penting karena untuk membangun ketahanan pangan dibutuhkan koordinasi dan sinergisme dalam ketiga subsistem ketahanan pangan yaitu ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang didalamnya termasuk masalah kewaspadaan pangan dan pemberdayaan masyarakat guna memperoleh suatu kebijakan yang mumpuni. Untuk melaksanakan koordinasi tersebut dilakukan melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan.

Dewan Ketahanan Pangan (DKP), merupakan lembaga non-struktural yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua, Menteri Pertanian sebagai Ketua Harian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan sebagai Sekretaris. Sedangkan anggota DKP terdiri dari 12 kementerian dan 2 lembaga non kementerian DKP yang mengemban fungsi koordinasi untuk mensinergikan kebijakan dan program ketahanan pangan lintas sektoral (pemerintah, pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan masyarakat) memiliki tugas: (1) merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi; dan (2) melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan nasional.

Koordinasi fungsional DKP diarahkan untuk menghimpun kekuatan bersama berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang memiliki komitmen tinggi pada isu ketahanan pangan. Untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar dalam mencapai tujuan bersama yaitu mengikis kelaparan dan kemiskinan.

Selain itu, juga untuk menjembatani implementasi pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan kebijakan-kebijakan pendukung sampai ketingkat pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat yang bergerak dalam kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan, sehingga perwujudan ketahanan pangan menyentuh seluruh sendi kehidupan manusia.

Pelaksanaan koordinasi fungsional antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah melalui forum DKP sebagaimana tertuang dalam Perpres No 83 tahun 2006 dilakukan melalui wadah: (1) Sidang Regional DKP yang penyelenggaraannya dilakukan setiap tahun, dan (2) Konferensi DKP yang merupakan pertemuan dua tahunan.

1. Sidang Regional DKP.

Pertemuan Sidang Regional DKP Kabupaten/Kota merupakan forum tertinggi dalam mekanisme DKP Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi, mendiskusikan, membahas permasalahan/menetapkan langkah-langkah operasional bersama dalam membangun ketahanan pangan di Kabupaten/Kota. Sidang Regional dihadiri oleh Ketua Harian dan Sekretaris DKP Kabupaten/Kota, Sekretaris DKP Provinsi, Ketua Komisi yang menangani pangan dan pertanian DPRD Kabupaten/Kota, Pengusaha daerah, dan Anggota Pokja DKP. Sidang DKP juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang promosi keberhasilan kegiatan ketahanan pangan di kabupaten/kota untuk saling berbagi informasi kepada daerah lain yang bisa dijadikan kegiatan percontohan.

Sidang Regional DKP bertujuan untuk: (1) mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai implementasi hasil kesepakatan Gubernur/Ketua DKP Provinsi dan Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota. (2) menetapkan landasan program ketahanan pangan tingkat Kabupaten/Kota yang membumi dan dapat dilaksanakan di masyarakat. (3) membangun kerjasama di bidang pangan lintas wilayah dan saling menguntungkan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Sebagai forum tahunan bagi kepala daerah tingkat II. tema yang diusung berbeda-beda sesuai dengan isu terhangat dalam ketahanan pangan. Berangkat dari tema tersebut dan hasil kesepakatan bersama yang disepakati oleh para Bupati/Walikota. maka akan dihasilkan langkah operasional maupun landasan acuan dalam pengambilan kebijakan ketahanan pangan regional yang akan berakumulasi pada perwujudan ketahanan pangan secara nasional.

Komitmen bersama untuk menempatkan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu basis penting pembangunan di daerah tidak akan memberikan arti yang signifikan jika tidak direalisasikan ke dalam langkah operasional dengan melibatkan seluruh subsektor terkait dan pemangku kepentingan yang ada di masyarakat. Seluruh kemampuan dan kreativitas aparat daerah dalam mengelola sumber daya produktif dan keragaman sosial budaya yang dimiliki akan tercermin pada penjabaran implementasi kesepakatan ketua DKP kabupaten/kota dalam bentuk program-program yang aplikatif di lapangan.

Tabel 17. Tema Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Periode 2002-2013.

No	Tahun	Tema
1.	2002	Perwujudan Ketahanan Pangan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Persatuan Bangsa dan Mengikis Kemiskinan.
2.	2003	Menggerakkan Pemangku Kepentingan dalam Memantapkan Ketahanan Pangan
3.	2004	Mewujudkan Ketahanan Pangan Wilayah dan Nasional Melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan
4.	2005	Optimalisasi Peran Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam Mengurangi Kemiskinan dan Mengatasi kerawanan Pangan dan Gizi.
5.	2006	Optimalisasi Peran Dewan Ketahanan Pangan dalam Melaksanakan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009

No	Tahun	Tema
6.	2007	Optimalisasi Peranan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dalam Mengurangi Kemiskinan serta kerawanan Pangan dan Gizi.
7.	2008	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
8.	2009	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Air dalam Rangka Gerakan Kemandirian Pangan
9.	2010	Meningkatkan Komitmen Daerah Untuk Kemandirian Dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
10.	2011	Mengembangkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim
11.	2012	Percepatan Pencapaian Swasembada Lima Komoditas Pangan Pokok
12.	2013	Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional melalui Dewan Ketahanan Pangan

Untuk mengetahui sejauhmana implementasi kesepakatan DKP yang telah ditandatangani pada pertemuan Sidang Regional DKP berikutnya dapat dilakukan evaluasi, sehingga dapat diketahui permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi yang harus dilakukan.

2. Konferensi DKP

Pada level Gubernur.pertemuan koordinasi yang dilakukan secara rutin setiap dua tahun sekali adalah konferensi DKP yang dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Ketua DKP.Sesuai dengan alur dan tata kerja koordinasi yang telah disepakati forum ini dilakukan melalui dua tahap.**Pertama.** Sidang konsultasi teknis yang diikuti oleh ketua harianDKP, sekretaris DKP, kepala badan/instansi/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi, Anggota Pokja Ahli, Pokja Teknis DKP,LSM dan Swasta.**Kedua.**Sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh ketua DKP provinsi. Dalam sidang konsultasi teknis,akan dihasilkan konsep bahan kesepakatan bersama para gubernur, untuk selanjutnya dilakukan penajaman pada sidang plenoselanjutnya sebagai kesepakatan bersama para

gubernur, yang secara simbolis akan dibacakan oleh perwakilan gubernur didepan Presiden RI.

Konferensi DKP merupakan forum tertinggi dalam mekanisme DKP untuk mengevaluasi, mendiskusikan, membahas permasalahan/menetapkan langkah-langkah operasional bersama dalam membangun ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, konferensi DKP juga menjadi wahana pengembangan jaringan antar daerah dan forum diskusi yang memfasilitasi pemangku kepentingan yang terkait dengan ketahanan pangan untuk memberikan masukannya bagi penyusunan program pemantapan ketahanan pangan.

Melalui forum ini para gubernur membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional dan wilayah yang menyangkut aspek ketersediaan, distribusi atau keterjangkauan. Konsumsi, serta mutu, gizi dan keamanan pangan. Dalam forum ini juga didiskusikan bersama-sama untuk mengevaluasi terhadap implementasi hasil kesepakatan Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang telah dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia; merumuskan dan membangun kesepakatan langkah-langkah operasional mendatang sebagai koreksi sekaligus inovasi baru dalam perwujudan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta memperlancar jaringan kerja antar daerah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya produktif, perdagangan antar daerah dan kemampuan mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Tema konferensi yang disepakati dalam konferensi DKP merupakan acuan bagi kepala daerah tingkat I dan para pemangku kepentingan, dalam merumuskan langkah operasional kebijakan ketahanan pangan.

Tabel 18. Tema Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Periode 2010-2012.

No	Tahun	Tema
1.	2010	Meningkatkan Komitmen Daerah untuk Membangun Kemandirian Pangan dan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2.	2012	Percepatan Pencapaian Swasembada Lima Komoditas Pangan Pokok

Hasil akhir dari forum ini adalah komitmen bersama para Gubernur untuk menempatkan pembangunan ketahanan pangan sebagai ujung tombak pembangunan di daerah yang secara operasional melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. Komitmen tersebut terwujud dalam bentuk rumusan hasil kesepakatan yang menjadi acuan daerah dalam melakukan program dan kegiatan ketahanan pangan daerah.

3. Kelompok Kerja DKP

Selain forum koordinasi Sidang Regional dan Konferensi DKP, mekanisme koordinasi yang dilakukan dalam wadah DKP antara lain: rapat kelompok kerja dan workshop DKP. Sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden No 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, guna membantu tugas DKP maka ketua harian DKP dalam hal ini Menteri Pertanian dapat membentuk kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari akademisi, tenaga ahli unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan nasional.

Ada tiga kelompok kerja DKP yang tertuang dalam peraturan Menteri Pertanian selaku ketua harian DKP yaitu: (1) Pokja Teknis DKP yang beranggotakan kementerian/lembaga terkait dengan sektor ketahanan pangan; (2) Pokja Ahli DKP yang beranggotakan dari para pakar akademisi, tenaga ahli unsur pejabat pemerintah, dan pemerhati di bidang pangan; dan (3) Pokja Khusus DKP yang beranggotakan dari lembaga swadaya masyarakat dan praktisi di bidang ketahanan pangan.

Kelompok kerja teknis dibentuk atas pertimbangan dalam rangka upaya mewujudkan ketahanan pangan. perlu melibatkan berbagai lintas sector kementerian/lembaga sehingga untuk menyatukan gerak langkah dan harmonisasi kegiatan perlu koordinasi perumusan kebijakan dan evaluasi. serta pengendalian program ketahanan pangan yang baik. Dalam menjalankan fungsinya, Pokja Teknis bertugas membantu DKP menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan nasional yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu, gizi, dan keamanan pangan. Selain itu Pokja Teknis juga berperan dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan nasional.

Kebijakan pangan tidak hanya semata-mata kewajiban Kementerian Pertanian belaka, tetapi juga perlu dukungan aktif dari kementerian dan lembaga lainnya yang terkait dengan bidang pangan. Oleh karena itu. koordinasi horizontal sangat diperlukan dalam hal ini. Untuk itu keberadaan Pokja Teknis DKP sangatlah membantu kinerja DKP yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tercatat 18 kementerian dan lembaga yang menjadi anggota Pokja Teknis DKP yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik; Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Adapun keberadaan Pokja Ahli DKP terbentuk atas dasar bahwa untuk melaksanakan salah satu tugas DKP yaitu merumuskan kebijakan dan

melaksanakan evaluasi serta pengendalian upaya pemantapan ketahanan pangan yang sistematis, komprehensif, mendalam dan berwawasan nasional diperlukan saran dan masukan dari para ahli di bidang ketahanan pangan. Pokja ini memiliki dua tugas mulia dalam membantu DKP yaitu: (1) menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan, dan (2) memberi masukan kepada DKP yang berkaitan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Secara teknis dalam melaksanakan tugasnya. Pokja Ahli DKP dapat mengadakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan mengundang berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan. Berbagai isu ketahanan pangan yang perlu ditanggapi dan ditangani secara cepat kerap kali menjadi agenda utama dalam pembahasan pertemuan Pokja Ahli DKP untuk menjadi bahan masukan dan rumusan kebijakan ketahanan pangan.

Di sisi lain, Pokja Khusus dibentuk dengan pertimbangan perlunya keterlibatan aktif dari berbagai pihak pemangku kepentingan dalam meningkatkan eksistensi dan menunjang pelaksanaan tugas DKP sebagai fungsi koordinasi pemantapan ketahanan pangan. Kelompok Kerja Khusus DKP sendiri bertugas dalam hal: (1) memberikan masukan kepada pemerintah melalui Dewan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan upaya-upaya pemantapan, sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan ketahanan pangan; (2) membantu sosialisasi dan konsultasi kebijakan ketahanan pangan kepada masyarakat; (3) menyerap dan mengartikulasikan pengalaman-pengalaman praktis masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan; (4) mendorong pengembangan prakarsa masyarakat untuk ketahanan pangan dan kemandirian pangan; dan (5) membantu pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Khusus bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian sebagai Ketua Harian DKP, melalui Sekretaris DKP. Sejumlah aktivis organisasi non-pemerintahan, organisasi tani nasional, dan organisasi kemasyarakatan menjadi anggota Pokja Khusus ini. Lahirnya Pokja Khusus ini dapat dikatakan sebagai pertemuan antara dua kebutuhan dari dua pihak yang selama ini sulit bertemu bahkan kerap kali berseberangan. Pihak pemerintah yang punya tanggungjawab dan kewenangan di bidang ketahanan pangan membutuhkan peran serta aktif dari elemen-elemen masyarakat untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan. Di sisi lain, elemen-elemen masyarakat sebagaimana direpresentasikan aktivis Organisasi non-Pemerintahan. Organisasi Tani dan Organisasi Masyarakatpun menuntut disediakan ruang partisipasi dan demokratisasi dari pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja DKP dirasakan memberikan kontribusi dalam pemantapan ketahanan pangan nasional dengan memberikan masukan dan saran serta merumuskan kebijakan ketahanan pangan kepada DKP. Keberadaan Pokja DKP dalam menanggapi isu-isu ketahanan pangan seperti: upaya percepatan diversifikasi pangan, penanganan kerawanan pangan, penanggulangan konversi lahan pertanian, strategi penyediaan cadangan pangan, keamanan pangan, penguatan kelembagaan pangan, pengembangan industri pangan berbasis bahan lokal untuk mendukung penganekaragaman pangan, stabilisasi harga pangan, distribusi pangan yang efektif, dan lain-lain.

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan semata-mata bukan hanya dilihat dari jumlah bahan pangan yang berhasil diproduksi dalam satu tahun, melainkan terukur dari pencapaian kualitas kesehatan individu sebagai hasil akhir. Oleh karena itu, seluruh anggota DKP memiliki peran

masing-masing dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Tidak hanya koordinasi secara horizontal tetapi koordinasi fungsional secara vertikal antara Pemerintah Pusat-Daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah mutlak dijalankan melalui DKP di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berjalannya fungsi koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah ditunjukkan dengan adanya pembagian peran melalui pemetaan tugas DKP Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana terangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 19. Pemetaan Tugas Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

No	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Pengaturan, pengawasan dan pembinaan peningkatan ketersediaan dan kerawanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi ketersediaan pangan 2. Mengumpulkan kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat 3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan; serta keragaman konsumsi pangan masyarakat; 2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal 3. Melakukan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sbg akibat menurunnya ketersediaan
2	Meningkatkan infrastruktur distribusi dan pembinaan peningkatan keragaman konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi infrastruktur distribusi 2. Mengembangkan infrastruktur distribusi provinsi dan mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur distribusi kabupaten 3. Mengidentifikasi dan melakukan pembinaan mutu dan keamanan pangan produk pangan pabrikan di provinsi 4. Mengumpulkan informasi harga di pasar provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis mutu, gizi, dan keamanan produk 2. Menganalisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat 3. Mengembangkan infrastruktur distribusi kabupaten 4. Pembinaan dan Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat 5. Mengumpulkan informasi harga di pasar kabupaten 6. Menciptakan pasar

No	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
		5. Mengembangkan jaringan jaringan pasar kabupaten→provinsi 6. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan halal 7. Mengkoordinasikan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sbagai akibat penurunan akses pangan	pangan yang dihasilkan masyarakat kabuapet. 7. Pembinaan dan pengawasan produk pangan halal 8. Melakukan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan 9. Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk

F. Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil atau *Smallholder Livelihood Development Project In Eastern Indonesia (SOLID)*.

Badan Ketahanan Pangan juga melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat sejak tahun 2011 dengan program aksinya adalah Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil atau *Smallholder Livelihood Development Project In Eastern Indonesia (SOLID)* dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga. Program tersebut didanai oleh IFAD dan dilaksanakan di Provinsi Maluku pada 6 (enam) kabupaten/kota, dan Maluku Utara pada 5 (lima) kabupaten/kota. Kegiatan tersebut juga mendukung program Pemerintah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bappenas dan Strategi IFAD untuk Indonesia (COSOP)(2009-2013).

Tabel 20. Sasaran Pelaksanaan Kegiatan SOLID tahun 2011 - 2014

No	INDIKATOR OUTPUT	VOL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
1	Jumlah kelembagaan masy. Kel. Mandiri	3300 KM	4%	10%	15%	22%	23%	14%	12%	100%
2	Jumlah kelembagaan masy. Federasi	330 FED		13%	19%	26%	20%	21%		100%

3	Jumlah Demplot yang dibangun	990 Demp	13%	19%	26%	20%	21%			100%
4	Jumlah prasarana yg dibangun	330 Desa		13%	19%	26%	20%			100%
	KUMULATIF		8%	22%	42%	65%	86%	95%	100%	

Catatan : Target pencapaian indikator output berubah setelah Midterm Review th 2014 (redesign phase II 2015-2018)

Tabel 21. Realisasi Capaian Kegiatan SOLID Tahun 2011-2014 per November 2014

No	INDIKATOR OUTPUT	VOL	2011	2012	2013	2014	Total
1	Jumlah kelembagaan masy. Kel. Mandiri /KM	3300 KM	132	339	468	1400	1400 KM (42 %)
	KK	49.500 KK					19.958 KK (41 %)
2	Jumlah kelembagaan masy. Federasi	330 FED.				116	224 Federasi (68 %)
3	Jumlah Demplot yang dibangun	990 Demp					990 Demplot (100 %)
4	Jumlah prasarana yg dibangun	330 Desa				116	224 Desa (68 %)
	REALISASI KUMULATIF		4%			42%	

Sumber : Sekretariat SOLID BKP

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan SOLID yaitu :

1. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat
 - Peningkatan kapasitas organisasi kelompok dan gabungan kelompok (Federasi)
 - Kesetaraan Gender
 - Penguatan akses modal mandiri.
2. Peningkatan Prod.Pertanian Terpadu
 - Percontohan usaha tani (demplot. SL)
 - Pelatihan ketrampilan teknis

3. Pengembangan rantai nilai dan pemasaran
 - Peningkatan nilai tambah dengan diversifikasi usaha unggulan.
 - Peningkatan skala Usaha berorientasi pasar
 - Fasilitasi sarana dan peralatan pertanian
4. Pembangunan Prasarana
 - Pembangunan prasarana untuk mobilitas akses usaha petani
5. Dukungan operasional manajemen
 - Sarana kerja.pelatihan bagi pelaksana kegiatan .
 - Monitoring dan evaluasi .

Sedangkan data keragaan pelaksanaan kegiatan provinsi Maluku dan Maluku Utara dapat dilihat pada lampiran.

Pada tahun 2014, Badan Ketahanan Pangan dan Tim IFAD melaksanakan evaluasi tengah periode/*Mid Term Review (MTR)* dengan hasil sebagai berikut :

1. Adanya perubahan/pengurangan sasaran yang disebabkan Jumlah desa, kelompok sasaran dan KK miskin phase I sebanyak 3.300 KM, 49.500 KK yang menjadi sasaran berkurang pada phase II sebanyak 812 KM. 12.880 KK. Perubahan tersebut dikarenakan:
 - (a) Ingin lebih meningkatkan kapasitas desa/KM yang sudah ada → tambahan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat;
 - (b) Sisa 106 desa sasaran SOLID lebih terpencil → operasional logistik yang lebih besar;
 - (c) Pengeluaran operasional untuk kegiatan keberlanjutan produksi pertanian akan meningkat pada setiap KM sehingga membutuhkan dana yang lebih besar;
 - (d) Keberhasilan peningkatan produksi pertanian lebih diutamakan sehingga apabila sudah tercapai diharapkan bisa direplikasi.
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Gender
 - (a) Penyegaran kapasitas organisasi dan manajemen km (2011-2014)
 - (b) Fasilitasi Matching fund bagi km lanjutan 2014-2015

- (c) Pelatihan penyegaran bagi PPL dan FLSM (CD dan Gender)
- (d) Fasilitasi km dan pelatihan buku produksi pangan dan perkebunan
- (e) Pelatihan pembukuan VIT

Output : kapasitas KM dalam merencanakan & melakukan kegiatan produksi pertanian, kemampuan KM baru dan lama dalam mengelola simpan pinjam.KM dalam federasi untuk melakukan kegiatan komersil.

3. Dukungan terhadap Produksi Pertanian & Pemasaran.

- (a) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan untuk mengurangi kerentanan pangan rumah tangga dan meningkatkan penghidupan keluarga petani (rumah tangga)
- (b) Paket pelatihan untuk peningkatan produktivitas bagi km dan pendamping
- (c) Pemberian nilai tambah bagi surplus produksi untuk penjualan tingkat local
- (d) Mendorong penciptaan nilai tambah dari surplus produksi tanaman pangan atau kegiatan produktivitas tanaman perkebunan
- (e) Identifikasi potensi surplus produksi untuk dijual di pasar local
- (f) Nilai tambah sederhana yang berupa kegiatan pemilahan, pengeringan, penyimpanan
- (g) Peningkatan sistem pertanian tanaman pangan & perkebunan, SL & Demplot. Pemberian input dan peralatan pertanian, infrastruktur (Akses Jalan & Air), pelatihan teknis (produksi, pasca panen, peralatan).

Output:produksi tanaman pangan & perkebunan yang berkelanjutan.serta peningkatan pendapatan melalui penjualan produk pertanian.

4. Pengembangan Rantai Nilai Tanaman Perkebunan

Fokus kepada 3 komoditas utama : Kelapa, Coklat & Pala, dengan:

- (a) Penguatan kapasitas organisasi & manajemen federasi (224 fed)
- (b) Fasilitasi federasi terpilih (Kantor dan peralatan) 45 federasi
- (c) Optimalisasi federasi (50%)

- (d) Kajian kelayakan *Variant Coefisient* (CV)
- (e) Identifikasi dan kemitraan
- (f) Memperlancar jaringan usaha *CoefisientVariant* (CV)

BAB.VPERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mantap, secara umum masih cukup tersedia berbagai potensi sumberdaya (alam, SDM, budaya, teknologi, dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk : meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan; mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilisasi harga pangan dan peningkatan cadangan pangan; serta mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

5.1.Ketersediaan Pangan.

- 1) Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan.belum seluruh potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah Indonesia dikelola secara optimal.
- 2) Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan.maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan.
- 3) Dukungan infrastruktur sumber daya air dalam penguatan strategi ketahanan pangan nasional.dapat ditempuh dengan langkah-langkah: pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, optimasi potensi lahan rawa dan air tanah, peningkatan water efficiency, dan pembuatan hujan buatan.
- 4) Potensi sumber daya alam yang beragam dan didukung ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.
- 5) Sumber karbohidrat lain seperti : jagung, ubi jalar, singkong, talas, dan sagu yang dahulu menjadi makanan pokok di beberapa daerah, juga tidak lebih rendah kandungan gizinya dari beras dan terigu.
- 6) Potensi sumber daya alam yang mengandung berbagai jenis sumberdaya hayati dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan untuk menjamin

ketersediaan pangan masyarakat secara merata dan sepanjang waktu di semua wilayah.

- 7) Peran pengembangan ilmu dan teknologi inovatif dalam pertanian sangat penting artinya sebagai sarana untuk mempermudah proses transformasi biomassa menjadi bahan pangan dan energi terbarukan.
- 8) Perkembangan teknologi industry, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan.

5.2.Distribusi Pangan.

- 1) Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai tantangan untuk dapat mendistribusikan bahan pangan secara tepat waktu sehingga tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan tersedia setiap saat.
- 2) Khusus untuk wilayah Indonesia bagian timur, kepulauan terpencil dan daerah perbatasan tantangan yang dihadapi adalah iklim yang kurang mendukung, terbatas sarana/prasarana yang memadai untuk transportasi, pasar dan sarana penyimpanan. dan informasi pasar.
- 3) Mengingat fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran maka peran pemerintah adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana/prasarana distribusi yang mudah dan murah, serta pengaturan pola produksi di masing-masing daerah, sehingga proses kelancaran distribusi pangan dari produsen ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil, dan bertanggung jawab.
- 4) Potensi masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana/prasarana distribusi antara lain jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan, dan penyimpanan cukup besar dan sangat bervariasi dari yang bersifat individu berskala kecil, usaha bersama berbentuk koperasi, hingga perusahaan besar, dan multinasional.
- 5) Tantangan di dalam perdagangan pangan internasional yang lebih adil khususnya dalam penerapan proteksi dan promosi perdagangan pangan yang semakin meningkat akan memberikan dampak yang baik dalam

pendistribusian bahan pangan dalam negeri. Dukungan masyarakat internasional dalam rangka menurunkan kemiskinan dan kerawanan pangan secara bersama-sama yang diwujudkan dalam bentuk aliansi antar negara pada kawasan regional dan internasional dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan distribusi pangan masyarakat.

- 6) Tantangan yang dihadapi dalam penyempurnaan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan serta pelaksanaan perangkat kebijakan yang memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar akan meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan yang menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah dari waktu ke waktu.

5.3. Konsumsi dan Keamanan Pangan.

- 1) Indonesia menempati rangking ke 4 dunia dalam jumlah penduduk, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk yang sangat besar tersebut memerlukan upaya-upaya yang tidak ringan. Namun demikian Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam serta mega bio diversity mempunyai potensi dan peluang sangat besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan.
- 2) Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi public, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik.
- 3) Meningkatnya pembinaan, penanganan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- 4) Berbagai kelembagaan di tingkat lokal di kecamatan dan desa dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan, seperti Posyandu, Balai Penyuluhan Pertanian, para penyuluh dari berbagai instansi terkait.dan

kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK, majelis taklim, dan sebagainya).

5.4. Manajemen Ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah, merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga dan individu. yang mencakup pada berbagai hal strategis, antara lain:

- 1) Jaringan kerjasama dengan instansi terkait pusat dan daerah.
- 2) Kerjasama dengan swasta dan masyarakat.
- 3) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
- 4) Penanganan ketahanan pangan kedepan semakin kompleks.

5.5 Permasalahan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi. baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

A. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan Indonesia pada saat ini masih dihadapkan pada:

- 1) Produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas.
- 2) Jumlah permintaan pangan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan restoran.
- 3) Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energi dan pakan ternak.

- 4) Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering terjadinya bencana alam.

B. Distribusi. Harga dan Cadangan Pangan

Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi yang masih dihadapi antara lain:

- 1) Sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen cenderung merugikan petani. Sebaliknya pada saat tertentu harga pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen.
- 2) Melonjaknya harga pangan dunia mengakibatkan kenaikan harga di dalam negeri karena ketergantungan terhadap ekspor pangan.
- 3) Terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau ombak laut tinggi sehingga mengganggu pelayaran) yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.
- 4) Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi akan berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan jatuh. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu.
- 5) Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak.
- 6) Masalah kelangkaan pangan di suatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.
- 7) Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di

pasar cukup sehingga jika stok di pasar tidak cukup maka akan berdampak terhadap harga pangan di pasar dapat membumbung tinggi.

C. Penganekaragaman. Pola Konsumsi Pangan. dan Keamanan Pangan

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain:

- 1) Keterbatasan kemampuan ekonomi atau daya beli dari keluarga;
- 2) Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;
- 3) Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- 4) Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai social, citra, dan daya terima;
- 5) Adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum;
- 6) Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- 7) Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit telah terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
- 8) Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.
- 9) Masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu;
- 10) Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;
- 11) Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;

- 12) Standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke dalam negeri;
- 13) Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar;
- 14) Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal;
- 15) Kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

D. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain:

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.
- 2) Rotasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering dilakukan sehingga pengelolaan ketahanan pangan menjadi lambat dan belum berkembang.
- 3) Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
- 4) Pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara berkesinambungan.
- 5) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal sehingga masih perlu ditingkatkan, terutama pada pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten/kota.
- 6) Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
- 7) Belum sepenuhnya terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

E. *Smallholder Livelihood Development Project In Eastern Indonesia (SOLID).*

- 1) Pengadaan konsultan firm belum kontrak, karena ada perubahan komposisi tenaga ahli dan di rencanakan bulan Januari 2015.
- 2) Pengadaan Internasional Konsultan Value Chain belum mendapatkan kandidat.